

BAGIAN DUA:
MEMPERKUAT
CIVIL SOCIETY

MEMPERKUAT CIVIL SOCIETY

Terma *civil society* dalam pengertian yang asli merupakan warisan wacana yang berkembang di Eropa Barat sejak pertengahan abad XVIII. AS. Hikam (1999), mengutip pendapat de Tocquville, menyatakan bahwa *civil society* adalah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), mandiri jika berhadapan dengan negara, serta memiliki keterkaitan dengan norma dan nilai hukum yang diikuti warganya.

Nilai-nilai *civil society* akan menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap dalam jaringan kelembagaan politik resmi. Pendek kata, *civil society* menekankan pentingnya ruang publik yang bebas (*the free public sphere*) sebagai sarana transaksi komunikasi yang dilakukan antarwarga.

Sejak pertengahan 1990-an konsep *civil society* berkembang menjadi salah satu tema yang banyak dibicarakan. Oleh beberapa ahli, *civil society* pun dicarikan padanan istilah agar lebih membumi, bernuansa islami, dan sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Misalnya, terdapat istilah masyarakat madani (Dato Seri Anwar Ibrahim), masyarakat sipil (Mansour Fakih), serta masyarakat kewargaan (Ryas Rasyid dan Riswanda Immawan).

Meski berbeda terma, namun beberapa istilah tersebut secara substansial bermuara pada perlunya penguatan masyarakat dalam kehidupan berbangsa untuk mengimbangi dan mengontrol kebijakan negara yang cenderung memosisikan warga sebagai subyek yang lemah. Sebagai kekuatan pengimbang dan pengontrol kebijakan pemerintah *civil society* harus menunjukkan kemandirian. Jika

modal kemandirian telah terpenuhi rasanya kekuatan *civil society* akan dapat memainkan peran menyuarakan aspirasi dan kritik pada penguasa dan negara untuk kepentingan masyarakat.

Tetapi, sangat disayangkan karena dalam kenyataannya kekuatan *civil society* belum sepenuhnya mandiri ketika berhadapan dengan kepentingan negara. Dengan kata lain, kekuatan *civil society* masih menunjukkan ketergantungan yang kuat pada negara. Jika kultur bergantung pada negara terus terjadi maka kemandirian *civil society* layak dipertanyakan. Sebab, ketergantungan *civil society* pada pihak eksternal, termasuk pemerintah, dalam tingkat tertentu pasti akan mengurangi sikap independensinya.

Apalagi jika ketergantungan itu berupa bantuan pendanaan untuk memberdayakan kekuatan *civil society*. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kekuatan *civil society* dapat berdiri dengan tegak dan mampu bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah jika dalam setiap menyelenggarakan kegiatan selalu meminta belas kasihan? Dalam kondisi bergantung pada pemerintah maka perasaan tidak enak dan kikuk pasti akan berkecamuk dalam setiap usaha mengkritisi kebijakan yang dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Pada konteks inilah kemandirian kekuatan-kekuatan *civil society* mutlak diperlukan.

Saat ini, kiprah *civil society* sebagai kekuatan kontrol pemerintah sangat diperlukan. Eksistensi *civil society* diharapkan banyak kalangan dapat memainkan peran penting di tengah kondisi sosial politik di mana partai-partai besar telah mengambil posisi untuk berkoalisi mendukung pemerintah. Dukungan partai-partai besar pada pemerintah pada saatnya jelas dapat mengebiri budaya *check and balances*. Padahal dalam alam demokrasi yang sehat jelas diperlukan adanya kelompok oposisi sebagai penyeimbang pemerintah. Kelompok oposisi inilah yang berkewajiban menjalankan fungsi kontrol terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dirasa tidak pro rakyat.

Tetapi, realitas politik pasca pemilu 2009 telah menunjukkan fenomena yang kurang menggembirakan. Syahwat politik kelompok elit terhadap kekuasaan tampak demikian besar. Akibatnya, kelompok elit pun disibukkan dengan politik dagang sapi dengan harapan dapat memperoleh pembagian kue kekuasaan. Bahaya

yang barangkali kurang disadari akibat sikap politik yang rakus kekuasaan ini adalah masa depan demokrasi.

Dapat dipastikan bahwa kehidupan alam demokrasi di negeri ini akan terus tergerus jika tidak ada kekuatan di luar pemerintah yang mampu tampil sebagai pengontrol. Padahal untuk tumbuh suburnya demokrasi sangat dibutuhkan kekuatan penyeimbang. Jika partai-partai besar sudah mengambil sikap berkoalisi dengan pemerintah maka kita tinggal berharap pada kekuatan *civil society*. Pada konteks inilah sesungguhnya kita banyak berharap pada organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan pilar *civil society* lainnya di luar partai politik untuk menampilkan diri sebagai kekuatan penyeimbang.

Kita layak berharap pada kiprah ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, untuk bersama-sama menyemai pohon demokrasi agar terus tumbuh subur di negeri ini. Selain mengandalkan kekuatan ormas, kita juga berharap pada media massa. Apalagi kekuatan media massa cetak dan elektronik sejauh ini telah menunjukkan efektivitasnya dalam menjalankan fungsi kontrol.

Di luar ormas dan media massa kita juga dapat mengandalkan lembaga pendidikan mulai dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Demikian juga dengan asosiasi profesi, NGO, dan kelompok *civic forum* yang ada di tengah-tengah masyarakat. Semua kelompok tersebut jelas dapat dijadikan pilar bagi tegaknya *civil society*. Untuk menjadikan kelompok-kelompok tersebut bebas dari intervensi pihak mana pun persyaratan yang harus dipenuhi adalah menunjukkan kemandirian. Sebab, selama masih ada kepentingan maka independensi pasti tidak akan pernah terjadi.

Akhir-akhir ini kekuatan *civil society* telah menunjukkan kiprah yang luar biasa. Perlawanan rakyat melalui dukungan moral dari jamaah *facebookers* pada dua anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dalam kasus yang populer disebut “Cicak versus Buaya” telah berhasil memberikan tekanan pada kejaksaan dan kepolisian. Gerakan “Koin untuk Prita” dalam rangka membantu Prita Mulyasari lepas dari jeratan hukum juga menunjukkan kekuatan yang sangat signifikan. Dua kejadian penting ini cukup menjadi

bukti betapa kesadaran masyarakat sudah demikian tinggi. Yang patut dibanggakan, ternyata dukungan berbagai kelompok *civil society* itu bersifat lintas agama, budaya, etnis, dan generasi.

Karena itu tidak mengherankan jika anak-anak TK dan SD pun mengenal figur Prita Mulyasari dengan sangat baik setelah terlibat dalam proses penggalangan koin untuk Prita. Bahkan anak-anak TK dan SD juga dapat menjelaskan dengan sangat fasih perihal dana talangan (*bailout*) yang dikucurkan pemerintah pada Bank Century.

Pertanyaannya, akankah perlawanan dalam bentuk dukungan *facebookers*, gerakan koin untuk Prita, dan perhatian masyarakat pada skandal Bank Century, dapat menjadi penanda munculnya *people power* dalam bentuk yang lain? Apa pun jawabannya, yang jelas fenomena tersebut telah memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kekuatan di luar pemerintah untuk mengontrol kebijakan.

Lebih dari itu, ternyata *civil society* dapat menjadi kekuatan penekan yang sangat efektif untuk memberikan daya dobrak (*the striking force*) pada pemerintah agar menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tugas kita sekarang adalah memperkuat pilar-pilar *civil society* dengan cara mendorong agar dapat mandiri sehingga terbebas dari kepentingan negara.

KIPRAH ORMAS DALAM PILKADA

Posisi organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) pada setiap menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat dikatakan memiliki daya pikat yang luar biasa. Hal ini dapat dipahami karena ormas memiliki sumber daya berupa tokoh-tokoh berpengaruh dan struktur organisasi hingga pelosok desa/kelurahan. Lebih dari itu, untuk ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah jelas memiliki jumlah anggota yang sangat banyak. Ini berarti sangat potensial untuk mendulang dukungan suara bagi pasangan calon dalam pilkada. Karena alasan inilah hampir semua calon yang akan berlaga dalam pilkada berupaya sekuat tenaga untuk meraih dukungan ormas. Atau paling tidak, dukungan itu dapat diberikan melalui tokoh-tokoh berpengaruh yang dimiliki ormas.

Maka, tidak mengherankan jika para calon harus rela melakukan “sowan” ke pimpinan ormas sebagai “kulonuwun politik”. Budaya sowan ini dijalani untuk memperoleh restu dan dukungan politik. Bagi para calon, restu dan dukungan dari tokoh ormas atau kyai berpengaruh akan dapat memberikan energi dan kepercayaan diri untuk mengarungi kompetisi yang begitu ketat dalam pilkada langsung. Budaya sowan politik ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang lumrah dijalankan para politisi yang ingin maju dalam pilkada. Sebab, dalam pilkada langsung jelas dibutuhkan dukungan banyak pihak, terutama mereka yang memiliki basis massa.

Di samping harus menjalani safari politik ke pimpinan organisasi, strategi yang sering dilakukan para calon adalah dengan mengidentifikasi diri sebagai anggota atau simpatisan ormas tertentu.

tu. Tampaknya, cara ini sangat efektif untuk mempengaruhi emosi pimpinan dan anggota ormas. Dengan strategi ini para calon dapat menyatakan bahwa dirinya memiliki kedekatan emosional dengan ormas.

Apalagi dalam proses identifikasi diri itu kemudian diikuti dengan janji-janji politik. Misalnya, akan membantu pelaksanaan program kerja ormas. Strategi lain yang juga dilakukan adalah dengan merekrut pimpinan ormas yang memiliki basis massa untuk menjadi pasangannya. Jika strategi ini tidak berhasil maka cara yang ditempuh adalah dengan merekrut pimpinan ormas yang berpengaruh untuk dijadikan tim sukses.

Fenomena tersebut umumnya kita jumpai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dalam situasi seperti ini ormas dituntut menentukan sikap politik yang tegas. Sebab, perekrutan pimpinan dan anggota ormas sebagai pasangan calon maupun tim sukses dalam tingkat tertentu dapat mempengaruhi soliditas organisasi. Dapat dibayangkan jika dalam satu ormas ada beberapa pimpinan yang turut bertarung dalam pilkada maka pasti akan memunculkan friksi di internal organisasi. Akibatnya, semangat kebersamaan dan ukhuwah yang telah terjalin akan terganggu oleh kepentingan politik setiap calon.

Seperti dalam pertarungan pilkada 2010 di 18 kabupaten/kota se-Jatim, dipastikan muncul beberapa calon yang berlatar belakang ormas berbeda. Bahkan di suatu kabupaten/kota dapat muncul beberapa pasangan calon dan tim sukses yang berasal dari satu ormas. *Nah*, dalam situasi persaingan memperebutkan posisi bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota ini gesekan yang melibatkan kelompok elit di suatu ormas sangat rentan terjadi. Akan lebih berbahaya lagi jika gesekan kepentingan elit berlanjut hingga di tingkat akar rumput. Jika ini yang terjadi maka harmonisasi dalam kehidupan sosial keberagaman pasti akan terganggu.

Pilihan Sikap Politik

Menurut saya, ada beberapa alternatif yang dapat diambil pimpinan ormas dalam merespon dinamika politik menjelang pilkada. *Pertama*, pimpinan ormas dapat bersikap mendukung

terhadap salah satu calon. Dengan sikap ini berarti ormas akan berusaha memaksimalkan sumberdaya, mulai pimpinan, kyai, anggota, hingga amal usaha untuk mendukung dan bahkan mengampanyekan calon tertentu. Sikap ini jelas sangat beresiko. Apalagi jika calon tersebut tidak memiliki kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas tinggi. Di samping itu, sikap politik ini sangat rawan dan memunculkan pro kontra di internal organisasi.

Faktanya, dalam setiap pemilu aspirasi politik anggota dan pimpinan ormas dapat dipastikan tersebar di banyak partai politik. Jika saja partai-partai politik tersebut manjagokan calon yang berbeda maka dapat dibayangkan ongkos sosial yang harus ditanggung ormas. Karena itulah sikap politik anggota ormas sesungguhnya tidak dapat diarahkan dengan hanya memilih satu pasangan calon tertentu.

Situasi yang kurang lebih sama juga terjadi dalam hubungan kyai dan santri. Dalam urusan keagamaan biasanya santri masih mendengarkan fatwa kyai. Tetapi, dalam urusan politik hubungan keduanya sangat longgar. Artinya, pilihan politik kyai sangat mungkin berbeda dengan santrinya. Dengan demikian, alternatif pertama ini seharusnya dihindari oleh pimpinan ormas.

Kedua, pimpinan ormas dapat bersikap dengan berdiam diri dan masa bodoh terhadap perkembangan politik di daerah. Alternatif kedua ini tentu sama ekstrimnya dengan yang pertama. Jika alternatif yang pertama mendukung salah satu calon, sikap yang kedua menunjukkan bahwa ormas bersikap seolah apatis dan tidak mau peduli dengan pilkada. Jika sikap ini yang diambil, berarti pimpinan ormas tidak berusaha memberikan kontribusi terhadap dinamika politik di daerah. Padahal, dukungan politik itu sangat penting bagi ormas untuk menjalankan kegiatan dakwahnya. Lebih dari itu, ormas seharusnya menunjukkan kiprahnya sebagai lembaga keagamaan yang salah satu fungsinya adalah dakwah amar makruf nahi munkar.

Ketiga, pimpinan ormas dapat bersikap *dual position*. Sikap ini mengharuskan pimpinan ormas mampu mencitrakan diri sebagai organisasi yang tidak secara tegas mendukung atau menolak pasangan calon tertentu. Dalam posisi ini ormas dapat ikut “bermain” guna memperoleh keuntungan dari beberapa pasang-

an calon potensial. Posisi *dual position* juga dapat ditempuh ormas melalui kerjasama dengan partai politik dan anggota DPRD yang memiliki kedekatan emosional. Dalam hal ini ormas secara organisatoris dapat menyatakan tidak mendukung calon tertentu, tetapi cukup menegosiasikan aspirasi politiknya pada partai politik dan para legislator.

Sikap *dual position* ini mengharuskan pimpinan ormas pintar bermain di atas panggung sandiwara. Meminjam istilah Erving Guffman dalam teori dramaturgi, ormas harus mampu membedakan penampilan dalam dua domain, panggung depan (*front region*) dan panggung belakang (*back stage*). Panggung depan adalah tempat melakukan pertunjukan. Sedang panggung belakang merupakan wajah sesungguhnya. Melalui panggung belakang inilah sikap politik sesungguhnya dari ormas dikemukakan.

Keempat, pimpinan ormas dapat bersikap kritis dan konstruktif. Ini berarti ormas harus bersikap kritis terhadap semua calon. Dalam posisi ini ormas harus melihat secara cermat *track record* semua calon. Selanjutnya ormas cukup memberikan kriteria calon yang dibutuhkan sesuai dengan tantangan yang dihadapi setiap daerah. Jika posisi ini yang diambil, maka ormas akan lebih leluasa dan tidak memiliki beban politik ketika harus memberikan fatwa berupa landasan normatif dan etik agar proses pilkada dapat terlaksana secara adil dan berkeadaban.

Dari beberapa alternatif tersebut, rasanya posisi yang paling mungkin diambil pimpinan ormas adalah bersikap kritis dan konstruktif. Sikap kritis dan konstruktif ini akan memberikan keuntungan bagi ormas sehingga dapat memainkan peran pada level *high politics* dan tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis.

BEDA SIKAP MUHAMMADIYAH DAN NU

Terasa sekali ada perbedaan gaya Muhammadiyah dan NU dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin, tampak sangat kritis pada pemerintah, terutama Presiden SBY. Sikap kritis Din biasanya diutarakan dengan bahasa yang jelas, vulgar, dan tidak berbelit. Salah satu wacana yang seringkali digulirkan adalah bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan publik. Pilihan kata inilah yang banyak dipersoalkan pendukung Presiden SBY dan elit di pemerintahan. Sebab, jika dikatakan telah melakukan kebohongan, maka itu berarti tidak lagi kehormatan (*marwa*) yang dapat dibanggakan oleh pemerintah.

Din menjelaskan bahwa kata kebohongan publik itu dipilih karena ada banyak ketakjujuran pemerintah dalam memperbaiki kondisi bangsa. Yang paling disorot adalah kesungguhan pemerintah dalam memberantas korupsi. Apalagi kasus korupsi kini telah menyentuh orang-orang yang sangat dekat dengan istana. Indikatornya, elit dan anggota DPR dari partai Demokrat banyak yang terseret dalam kasus korupsi. Di antara menteri yang menjabat di pemerintahan SBY juga mulai dikaitkan dengan kasus korupsi yang kini menjadi perhatian publik. Fenomena ini menandakan bahwa korupsi benar-benar telah menggerogoti negeri ini hingga ke pusat kekuasaan.

Perihal sikap kritis Din, sebagian orang mengaitkan dengan latar belakangnya sebagai mantan politisi. Gaya komunikasi Din juga dikaitkan dengan fakta bahwa beliau bukan orang Jawa. Karena itu di kalangan warga Muhammadiyah sejatinya ada yang menganjurkan agar Din meneladani KH. Abdurrazaq Fakhruddin (Pak AR). Di zaman Orde

Baru, Pak AR bisa menampilkan model dakwah amar makruf nahi munkar yang sangat sejuk pada pemerintah. Dengan gaya bahasa yang santun, Pak AR biasa memberikan kritik pada Presiden Suharto. Kritik Pak AR ternyata sangat manjur sehingga tidak menimbulkan amarah penguasa Orde Baru tersebut. Hubungan Muhammadiyah dan pemerintah Orde Baru pun terasa sangat hangat.

Sikap kritis Muhammadiyah pada pemerintah ternyata bukan hanya monopoli Din. Buya Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, juga menunjukkan sikap yang sama. Bahkan Buya Syafii pernah membuat pernyataan yang sangat mungkin menjadikan Presiden SBY dan pendukungnya marah. Itu terjadi saat SBY menjabat presiden pada periode pertama. Saat itu Buya Syafii menyatakan bahwa “the real president” adalah Jusuf Kalla (JK). Pernyataan ini dikemukakan dengan berdasar pada kinerja luar biasa JK saat mendampingi SBY. Gara-gara pernyataan ini pula hubungan pribadi antara SBY dan Buya Syafii memburuk.

Yang lebih mencolok, gedung PP Muhammadiyah juga sering digunakan tempat pertemuan tokoh-tokoh nasional. Umumnya mereka adalah tokoh yang selama ini dikenal sangat kritis dan lawan politik SBY. Meski dikemas dalam acara silaturahmi untuk memperbincangkan masalah bangsa, kegiatan yang dihelat di gedung PP Muhammadiyah dapat dimaknai sebagai simbol sikap kritis pada pemerintah. Para kritikus yang hadir pun sangat nyaman mengutarakan keprihatinannya terhadap perjalanan bangsa di bawah kepemimpinan SBY.

Sementara itu, NU melalui Ketua Umum PBNU, Prof. Said Aqil Siraj, menunjukkan sikap yang jauh lebih bersahabat dengan pemerintah. Dalam beberapa kali kesempatan Said menegaskan bahwa NU tidak akan ikut-ikutan mendiskreditkan pemerintah. Dikatakan Said, NU tidak akan larut dalam gerakan tokoh agama yang menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan publik. NU memilih strategi dengan mengingatkan secara langsung pada penguasa. Bagi Said, strategi itu merupakan representasi dakwah amar makruf nahi munkar model NU. Tetapi karena lebih sering mengamini kebijakan pemerintah daripada mengkritisnya, elit NU pun banyak menuai kritik terutama dari kalangan muda. Bahkan ada guyonan, bahwa PBNU saat ini adalah “PBNU Plat Merah”, yang berarti pengawal kebijakan pemerintah.

Perbedaan Muhammadiyah dan NU dalam menyikapi kebijakan pemerintah telah mengundang pertanyaan. Publik menduga bahwa ada kepentingan yang melatarbelakangi perbedaan sikap elit dua organisasi keislaman tersebut. Sebagian orang mengatakan bahwa sikap kritis Din disebabkan kekecewaan Muhammadiyah terhadap presiden SBY. Sebab, masih segar dalam ingatan warga Muhammadiyah tatkala presiden SBY tidak menghadiri muktamar Yogyakarta pada 3-8 Juli 2010 silam. SBY juga dinilai kurang mengakomodasi kader-kader Muhammadiyah untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Sementara dengan NU, SBY menunjukkan kemesraan luar biasa. SBY juga mengamodasi kader-kader NU untuk menduduki jabatan di kementerian.

Penjelasan tersebut mungkin ada benarnya. Tetapi, sebagai bagian dari pilar *civil society*, tentu sangat disayangkan jika perbedaan sikap itu dilatarbelakangi kepentingan politik sesaat. Karena itu sudah seharusnya Muhammadiyah dan NU bersinergi dengan menampilkan diri sebagai kekuatan *checks and balances* pada pemerintah. Posisi ini perlu diambil karena keduanya memiliki sejarah panjang sebagai *civil society*. Bahkan keduanya telah lahir dan berkiprah dalam banyak bidang kehidupan jauh sebelum negeri ini merdeka. Tetapi untuk menjadi organisasi yang bebas dari kepentingan maka yang dibutuhkan keduanya adalah kemandirian. Sayang sekali, spirit kemandirian ini tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah bagi keduanya.

Dengan menjadi organisasi yang mandiri maka Muhammadiyah dan NU dapat menempatkan diri sebagai pilar *civil society* yang independen, bebas dari kepentingan politik kekuasaan. Keduanya juga tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah, terutama dalam urusan pendanaan untuk menggerakkan roda organisasi. Jika memang pemerintah memberikan bantuan maka itu harus dipahami sebagai bagian dari tugasnya. Sebab, jika melihat kiprahnya maka jelas sekali keduanya telah banyak membantu tugas pemerintah. Keduanya telah menunjukkan kiprah yang luar biasa dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi umat.

POSISI KRITIK MUHAMMADIYAH

Banyak pihak berspekulasi bahwa sikap kritis Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terhadap pemerintah didasarkan pada kalkulasi politik tertentu. Diantaranya beredar pandangan yang menyatakan bahwa sikap kritis Din Syamsuddin ini dimaksudkan sebagai investasi politik untuk meraih kekuasaan pada pemilu 2014. Tentu saja analisis seperti ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena dalam politik semua serba mungkin. Apalagi dunia politik juga selalu menghadirkan kejutan. Tetapi, melihat kiprah seseorang hanya dalam sudut pandang politik juga tidak dapat dibenarkan.

Sebagai *insider*, saya tentu memahami sikap kritis Din Syamsuddin ini dalam konteks sedang menerjemahkan rumusan politik kebangsaan Muhammadiyah. Rumusan konsep politik kebangsaan ini tertuang dalam dokumen resmi organisasi yang telah diundangkan Muhammadiyah. Keputusan resmi organisasi jelas memberikan amanat agar Muhammadiyah senantiasa berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan seruan ini selalu menjadi panggilan sejarah sejak zaman pergerakan hingga awal kemerdekaan. Sebagai organisasi yang lebih tua dari negeri ini kiprah Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa jelas tidak diragukan lagi.

Posisi kritik Din Syamsuddin akhir-akhir ini memang terasa menonjol. Apalagi kantor pimpinan pusat Muhammadiyah sering dijadikan pertemuan sejumlah kelompok kritis dan oposisi. Yang mutakhir tentu saja adalah pertemuan tokoh lintas agama yang menghasilkan ikrar tahun tanpa kebohongan. Bermula dari pertemuan inilah gerakan anti kebohongan yang disuarakan berba-

gai kelompok terus menggelinding. Dalam berbagai kesempatan Din Syamsuddin telah memberikan klarifikasi bahwa pertemuan tokoh lintas agama itu sesungguhnya kegiatan *Maarif Institute* (LSM yang didirikan Buya Syafii Maarif). Jadi, sebenarnya tidak ada hubungan dengan aktivitas Muhammadiyah. Tetapi, karena tempat acaranya di Muhammadiyah maka Din Syamsuddin pun disorot dan dianggap penggagas gerakan anti kebohongan.

Inilah resiko bagi seorang ketua organisasi sosial keagamaan. Dalam perkembangannya, sorotan tidak hanya ditujukan pada Din Syamsuddin secara pribadi, melainkan juga Muhammadiyah. Bahkan ada yang menduga sikap kritis ini disebabkan karena Presiden SBY tidak menghadiri muktamar Muhammadiyah. Tentu saja spekulasi ini tidak benar jika orang memahami sifat gerakan Muhammadiyah.

Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang menekankan ajaran dakwah amar makruf nahi munkar. Karena itu berbagai kritik yang diutarakan Din Syamsuddin harus dipahami dalam konteks melaksanakan dakwah amar makruf dan nahi munkar. Sejauh ini Muhammadiyah sudah membuktikan selalu mendukung pemerintah, siapa pun yang berkuasa, asalkan berada dalam jalan yang benar. Sebaliknya, jika pemerintah melakukan kesalahan maka Muhammadiyah tidak pernah ragu untuk mengingatkan. Inilah cara Muhammadiyah untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muhammadiyah memahami bahwa berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan melalui dua jalur. Pertama, melalui kegiatan politik praktis sebagaimana dijalankan partai-partai politik. Kedua, melalui kegiatan kemasyarakatan dalam bentuk pemberdayaan dan pembinaan. Manifestasi jalur kedua ini juga dapat ditempuh dengan cara politik tidak langsung. Misalnya, dengan cara mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui perjuangan moral (*moral force*) agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Strategi perjuangan inilah yang disebut dengan politik tingkat tinggi (*high politics*).

Dalam usia lebih dari satu abad, Muhammadiyah konsisten menentukan pilihan perjuangan politik melalui jalur *high politics*.

Manifestasi *high politics* ini mengharuskan Muhammadiyah menjaga jarak yang sama dengan semua organisasi politik. Pilihan strategi ini membawa resiko karena Muhammadiyah tidak memiliki saluran utama dalam menyuarakan aspirasi politik. Tetapi, sejauh ini Muhammadiyah masih dapat menitipkan aspirasi melalui kadernya yang bertebaran di beberapa partai politik.

Persoalan menjadi kompleks tatkala sebagian besar partai politik mengambil sikap mendukung pemerintah dengan kompensasi mendapat bagian kekuasaan. Kultur politik seperti ini jelas membahayakan masa depan demokrasi. Karena dalam alam kehidupan demokrasi yang sehat, posisi kekuatan kontrol yang memainkan peran *checks and balances* terhadap pemerintah sangat dibutuhkan.

Jika peran *checks and balances* tidak dapat dimainkan dengan baik oleh partai politik dan lembaga politik formal di negara, maka kekuatan organisasi sosial keagamaan sebagai salah satu pilar *civil society* dapat menjadi alternatif. Dalam konteks inilah Muhammadiyah terdorong untuk turut serta mengawal perjalanan bangsa agar terwujud kehidupan yang lebih baik dalam bermasyarakat dan bernegara. Tampaknya, posisi inilah yang sedang dimainkan Din Syamsuddin.

Banyak pihak berspekulasi bahwa gerakan kritis yang sedang didorong Din Syamsuddin telah masuk dalam ranah politik praktis. Spekulasi ini kemudian dikaitkan dengan latar belakang Din Syamsuddin yang pernah memimpin departemen penelitian dan pengembangan partai Golkar. Jalan pikiran ini memang efektif untuk memojokkan gerakan moral yang kini sedang terjadi. Tetapi, agar terhindar dari polemik mengenai adanya politisasi terhadap gerakan kritis ini maka semua pihak, terutama pemerintah, seharusnya mencermati substansi kritik yang telah dikumandangkan berbagai pihak. Berbagai kritik ini harus diposisikan sebagai bentuk kecintaan dan kerinduan para pengkritik terhadap negeri ini.

Din Syamsuddin sebagai pemimpin salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar jelas sangat merindukan keadaan negeri yang bebas dari berbagai problem. Bagi Din Syamsuddin, kalau bangsa ini terus terpuruk maka yang akan menderita ada-

lah rakyat. Jika ini yang terjadi maka Muhammadiyah sebagai bagian dari bangsa ini juga pasti terkena dampaknya. Peringatan akademisi yang beranggotakan rektor dari perguruan tinggi negeri dan swasta mengenai potensi Indonesia untuk menjadi negara gagal patut menjadi perhatian (*JP*, 5/2). Agar keadaan tidak semakin memburuk maka pemerintah tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap berbagai kritik konstruktif.

Yang harus ditunjukkan pemerintah kini adalah meningkatkan kinerja. Muhammadiyah sebagai bagian dari *civil society* jelas sangat berkepentingan dengan perbaikan kinerja pemerintah sehingga terwujud negara yang adil dan makmur. Dalam perspektif Muhammadiyah negara ini dilukiskan dengan ungkapan; *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (negara yang baik dan berada dalam ampunan Tuhan). Tentu saja, untuk mencapai keadaan yang demikian diperlukan kerja keras. Bahkan kerja keras saja tidak cukup. Dibutuhkan juga kesiapan pemimpin dan rakyat di negeri ini untuk mendekatkan diri pada Allah.

UJIAN KEMANDIRIAN MUHAMMADIYAH

Muktamar satu abad Muhammadiyah akan diselenggarakan mulai 3-8 Juli 2010 di kota kelahirannya, Yogyakarta. Yang agak berbeda dari muktamar kali ini adalah ketidakhadiran Presiden SBY secara langsung. SBY dipastikan tidak menghadiri muktamar karena melakukan kunjungan kenegaraan di Turki dan Kanada. Setelah menjalankan tugas kenegaraan itu SBY langsung melaksanakan ibadah umrah. Sebagai gantinya, SBY akan membuka muktamar melalui sambungan telepon satelit dari Madinah.

Ketidakhadiran SBY ini pun memunculkan sejumlah spekulasi. Sebagian warga persyarikatan menduga bahwa ini adalah pertanda SBY kecewa dengan sikap kelewat kritis yang selama ini diperlihatkan elit Muhammadiyah. Bahkan ada yang berpikiran lebih jauh, bahwa SBY sudah tidak lagi menempatkan Muhammadiyah sebagai mitra dalam menyukseskan program pemerintahannya.

Spekulasi tersebut langsung dementahkan oleh Din Syamsudin. Ia meyakini bahwa tidak ada niatan SBY untuk meremehkan atau merendahkan Muhammadiyah. Karena itu, ketidakhadiran SBY secara fisik di Yogyakarta seharusnya disikapi positif oleh warga Muhammadiyah. Meski penjelasan telah dikemukakan, tapi ketidakhadiran SBY tetap menyisakan pertanyaan dan kekecewaan sebagian warga Muhammadiyah. Kekecewaan ini dapat dipahami karena dalam sejarahnya, Muhammadiyah selalu memiliki kedekatan dengan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan kelompok profesional berlatar belakang Muhammadiyah dalam sejumlah jabatan penting di pemerintahan.

Permintaan Din Syamsuddin untuk tidak mempersoalkan ketidakhadiran SBY rasanya sudah tepat. Muhammadiyah harus tetap menatap masa depan dengan rasa optimis sehingga dapat terus melahirkan amal sosial sesuai dengan karakter ideologinya yang berprinsip pada gerakan amal (*a faith with action*). Apalagi muktamar ke-46 akan menjadi momentum untuk mengantarkan Muhammadiyah memasuki abad kedua. Bahkan Muhammadiyah juga harus mulai terbiasa melaksanakan acara resmi organisasi meski tanpa dihadiri perwakilan pemerintah.

Bukankah muktamar satu abad Muhammadiyah ini jauh telah dirancang untuk mandiri? Bahkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah me-*launching* program Gerakan Infaq Rp. 2000,- (GI 2000) untuk muktamar mandiri. Sasaran program GI 2000 adalah siswa, guru, karyawan, dan pimpinan amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah juga mengajak simpatisan dan dermawan untuk beramal melalui gerakan tersebut. Melalui program GI 2000 Muhammadiyah berkomitmen untuk melaksanakan muktamar mandiri dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.

Meski banyak kalangan mempersepsi bahwa program GI 2000 diluncurkan sebagai konsekuensi sikap kritis Muhammadiyah pada berbagai kebijakan pemerintah. Sikap kritis ini bahkan dipahami sebagai bentuk kekecewaan Muhammadiyah karena tidak diakomodasi pemerintah dalam pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Bahkan jika ditilik ke belakang, terutama pada saat menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, tampak sekali arah dukungan politik elit Muhammadiyah.

Terlepas dari adanya faktor sosial politik yang melatarbelakangi, rasanya niatan Muhammadiyah untuk menjadi organisasi yang mandiri layak diapresiasi. Sebab, sudah menjadi tradisi di kalangan pimpinan ormas untuk senantiasa meminta dukungan pemerintah berbentuk bantuan dana dan kehadiran pada saat ormas menyelenggarakan berbagai acara. Bahkan ada kesan rasa kurang percaya diri dari pimpinan dan anggota ormas ketika acara-acara resmi organisasi tidak dihadiri wakil pemerintah. Kehadiran wakil pemerintah bahkan seringkali dijadikan semacam restu. Realitas ini menunjukkan betapa ketergantungan ormas pada pemerintah begitu besar.

Jika kultur bergantung pada pemerintah tersebut terus terjadi maka kemandirian ormas jelas patut dipertanyakan. Sebab, ketergantungan ormas pada pihak-pihak eksternal, termasuk pemerintah, dalam tingkat tertentu pasti akan mengurangi sikap independensinya. Apalagi jika ketergantungan itu berupa bantuan pendanaan untuk menggerakkan kegiatan organisasi.

Pertanyaannya, bagaimana mungkin ormas dapat berdiri tegak dan mampu bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah jika dalam setiap menyelenggarakan acara selalu meminta belas kasihan? Dalam kondisi bergantung pada pemerintah maka perasaan tidak enak pasti akan berkecamuk dalam setiap usaha mengkritisi kebijakan yang dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan. Pada konteks inilah kemandirian ormas, termasuk Muhammadiyah, menjadi mutlak diperlukan.

Muhammadiyah sebagai salah satu pilar *civil society* diharapkan banyak kalangan dapat memainkan peran penting di tengah kondisi sosial politik di mana partai-partai besar telah mengambil posisi untuk berkoalisi dengan pemerintah. Akibatnya, kelompok elit pun disibukkan dengan politik dagang sapi dengan harapan dapat memperoleh pembagian kue kekuasaan. Kondisi ini pada saatnya jelas dapat mengebiri budaya *checks and balances*.

Padahal dalam alam demokrasi yang sehat jelas dipersyaratkan adanya kelompok oposisi sebagai penyeimbang pemerintah. Kelompok oposisi inilah yang berkewajiban menjalankan fungsi kontrol terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Pada konteks inilah sesungguhnya kita banyak berharap pada ormas dan pilar *civil society* lainnya di luar partai politik untuk menampilkan diri sebagai kekuatan penyeimbang.

Karena itu, kesempatan muktamar satu abad ini sesungguhnya dapat dijadikan momentum untuk meneguhkan semangat kemandirian Muhammadiyah. Inilah saat yang tepat bagi Muhammadiyah untuk keluar dari beban psikologis yang telah dijalani bertahun-tahun. Selama ini dalam tingkat tertentu Muhammadiyah merasa *ewuh pakewuh* ketika harus mengkritisi kebijakan pemerintah. Salah satu sebab yang sangat mungkin terjadi adalah karena Muhammadiyah masih sering bergantung pada pemerintah.

Dengan bersikap mandiri Muhammadiyah diharapkan mampu memberikan daya dobrak (*the striking force*) yang lebih kuat pada pemerintah untuk menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukankah sudah sekian lama Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang secara konsisten menjalankan dakwah amar makruf nahi munkar?

Dengan usia yang lebih tua dari negeri ini, Muhammadiyah berarti sudah berpengalaman dan teruji mengelola organisasi. Muhammadiyah tetap eksis dan tidak pernah mengubah jati diri gerakan. Jadi, kalau hanya untuk memenuhi keperluan menyelesaikan program maka sudah saatnya Muhammadiyah tidak lagi meminta belas kasihan pemerintah. Jika pemerintah memberikan fasilitas maka itu harus dipahami sebagai timbal balik karena Muhammadiyah telah membantu tugas negara untuk turut mencerdaskan dan menyejahterahkan rakyat.

Yang penting diingat, bahwa komitmen untuk mandiri itu tidak harus diekspresikan dengan membusungkan dada karena itu menunjukkan kesombongan. Muhammadiyah harus tetap bersinergi dengan pemerintah untuk terus berkarya, terus memberi, dan tanpa berharap kembali. Ibarat jarum jam, Muhammadiyah harus terus bergerak untuk melahirkan amal sosial yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Semoga muktamar satu abad ini dapat memberikan spirit bagi Muhammadiyah untuk menjadi organisasi yang mandiri.

APA KABAR SAUDAGAR MUHAMMADIYAH

Tema besar yang diusung Muhammadiyah saat memasuki abad kedua adalah kemandirian. Berbagai kiat telah dicanangkan. Salah satunya adalah bekerjasama dengan perbankan untuk memobilisasi potensi ekonomi Persyarikatan. Berkaitan dengan ini Muhammadiyah telah mencanangkan penyatuan rekening amal usaha ke beberapa bank syariah. Rencana ini telah dituangkan dalam nota kesepahaman antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pimpinan beberapa bank syariah.

Ikhtiar ini tentu diharapkan mampu membangun hubungan yang saling menguntungkan Muhammadiyah dan perbankan. Dengan ribuan amal usaha bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, potensi Muhammadiyah sesungguhnya sangat besar. Sayangnya rekening amal usaha Muhammadiyah sejauh ini masih tercecer di banyak bank tanpa ada ikatan perjanjian yang saling menguntungkan. Karenanya, gagasan menyatukan rekening di beberapa bank yang berlabel syariah patut diapresiasi.

Sebagai salah satu pilar *civil society*, Muhammadiyah dituntut terus berkarya. Ibarat jarum jam, Muhammadiyah harus terus bergerak untuk melahirkan amal sosial. Seperti matahari, Muhammadiyah harus terus bersinar mencerahkan umat. Semangat memberi yang selama ini menjadi karakter Muhammadiyah harus terus ditumbuhkan melalui amal usahanya.

Konsistensi perjuangan Muhammadiyah sejauh ini dapat diamati melalui amal usaha yang didirikan, seperti sekolah, rumah sakit, unit ekonomi, dan panti asuhan. Capaian di bidang

amal usaha telah mengundang kekaguman banyak pihak. Muhammadiyah pun dikatakan sebagai bagian dari cerita sukses, bukan hanya organisasi Islam di Indonesia, tetapi juga di dunia.

Sejak didirikan, Muhammadiyah telah menunjukkan jati dirinya sebagai organisasi yang sangat mementingkan amal sosial. Karena itu tidak berlebihan jika Muhammadiyah disebut sebagai organisasi yang menekankan pentingnya penghayatan ajaran agama dalam bentuk amalan (*a faith with action*).

Jika diamati, implementasi ajaran agama yang dipraktikkan generasi Muhammadiyah periode awal menunjukkan keberpihakan pada “wong cilik.” Itu dibuktikan Ahmad Dahlan dan murid-muridnya yang sangat perhatian pada fakir miskin dan anak yatim. Melalui kajian yang mendalam terhadap surat al-Ma’un, Kiai Dahlan menunjukkan teladan dengan memberikan sabun, beras, dan pakaian bagi masyarakat lemah (*mustadl’afin*).

Metode memahami ajaran agama dalam sudut pandang Kiai Dahlan tampaknya sangat membekas bagi warga Muhammadiyah. Nilai-nilai kedermawanan Kiai Dahlan turut membentuk ajaran tolong-menolong (*al-Maunisme*). Keseriusan Kiai Dahlan selanjutnya diwujudkan dengan membentuk Majelis Penolong Kesejahteraan Oemoem (PKO) untuk memperbaiki kesejahteraan umat.

Perspektif historis ini penting dikemukakan untuk mengingatkan kembali kiprah Muhammadiyah sebagai pelopor kesejahteraan umat. Dalam perkembangannya Muhammadiyah terus berusaha menampilkan diri sebagai gerakan filantropi. Sangat disayangkan, posisi sebagai gerakan filantropi ini tidak sepenuhnya diikuti dengan penguatan di bidang ekonomi. Padahal untuk menjadi kekuatan *civil society*, Muhammadiyah harus menjadi organisasi yang kuat dan mandiri dalam aspek ekonomi. Pada konteks inilah Muhammadiyah membutuhkan sebanyak mungkin kelompok saudagar untuk masuk dalam kepengurusan. Kelompok saudagar ini diperlukan untuk memperkuat sektor ekonomi umat, utamanya warga Muhammadiyah.

Dengan menjadi organisasi yang kuat secara ekonomi, maka Muhammadiyah tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Ini penting ditekankan karena sejauh ini posisi organisasi

kemasyarakatan (ormas) umumnya kurang mampu menjalankan fungsi *checks and balances* pada pemerintah dan partai-partai politik. Jika ditelisik penyebabnya dapat dikatakan bahwa ternyata ormas itu masih banyak yang bergantung pada pemerintah dan partai-partai politik, terutama dalam bantuan pendanaan. Karena itulah ormas keagamaan harus memperkuat posisi sosial ekonomi agar dapat mandiri dan terbebas dari kepentingan-kepentingan jangka pendek.

Muhammadiyah juga harus menunjukkan kepeloporannya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Posisi ini harus diambil jika tidak ingin mengalami hambatan dalam menjalankan tugas dakwah amar makruf nahi munkar. Ini berarti Muhammadiyah harus membangun kembali kedai-kedai ekonomi untuk memperbaiki kesejahteraan umat. Untuk mempercepat pertumbuhan kedai-kedai ekonomi itulah diperlukan kelompok saudagar. Aktifis berlatar belakang saudagar ini diharapkan dapat menumbuhkan spirit enterpreneur di kalangan warga Muhammadiyah. Bukankah kelompok entrepreneur kini sangat dibutuhkan bangsa untuk meminimalkan jumlah pengangguran?

Pelibatan kelompok saudagar Muhammadiyah diharapkan dapat menghasilkan pelaku-pelaku ekonomi yang mampu membuat terobosan untuk menggerakkan perekonomian umat. Yang harus selalu diingat, Kiai Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah adalah pelaku ekonomi sekaligus juru dakwah. Itu berarti sejarah Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari kelompok saudagar.

Kehadiran kelompok saudagar dapat memberikan energi yang besar bagi perkembangan Muhammadiyah di masa mendatang. Saudagar Muhammadiyah bertugas untuk mencerahkan umat agar mampu mengentaskan diri dari keadaan yang miskin dan lemah. Tentu tidak cukup dengan pencerahan, saudagar Muhammadiyah juga harus memberikan bantuan modal dan pendampingan. Tugas ini akan terlaksana dengan baik jika saudagar Muhammadiyah juga menyediakan pusat-pusat kegiatan ekonomi umat. Dengan cara ini maka Muhammadiyah dapat terus berkontribusi untuk memperbaiki keadaan bangsa.

INTELEKTUAL DI BALIK PILPRES

Fenomena yang menarik diamati dalam pemilihan presiden (pilpres) kali ini adalah keterlibatan kaum intelektual. Posisi kaum intelektual dalam pilpres layak disorot karena kiprahnya sangat menentukan capaian keberhasilan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk memenangkan pertarungan menuju istana. Sejak era reformasi, posisi kaum intelektual dari beberapa LSM dan perguruan tinggi mulai dipandang penting oleh elit partai seiring dengan kebutuhan untuk melakukan marketing politik.

Elit partai politik tentu sangat berkepentingan dapat membangun citra pasangan capres dan cawapres yang didukung sehingga dapat diterima oleh rakyat. Dalam konteks inilah lembaga-lembaga survei dan konsultan politik laris manis. Para akademisi pun, terutama yang berlatar belakang sosial politik, banyak yang menekuni lahan baru sebagai konsultan politik bagi partai politik dan anggota legislatif. Profesi yang juga laris saat ini adalah survei untuk mengetahui tingkat elektabilitas calon kepala daerah.

Seakan tidak mau ketinggalan, setiap pasangan capres dan cawapres yang berlaga dalam pemilu 8 Juli 2009 juga merekrut kaum intelektual dalam barisan tim sukses. Pasangan Mega-Prabowo merekrut intelektual sekaliber Imam Sugema, M. Prakosa, dan Moeslim Abdurrahman sebagai tim ahli dan peneliti. Pasangan SBY-Boediono juga merekrut Malarangeng bersaudara (Rizal dan Zulkarnain), Deny J. A, dan Bima Aria Sugiharto, sebagai konsultan politik. Sementara pasangan JK-Wiranto menggandeng Ahmad Erani Yustika, Indra J. Piliang, Fadhil Hasan, dan Arie Batubara, sebagai tim kajian dan pencitraan.

Keterlibatan kaum intelektual dalam pilpres tentu harus dipahami sebagai fenomena yang wajar sepanjang tidak terjadi bias kepentingan. Hal ini berarti kaum intelektual harus tetap menjaga kredibilitasnya sebagai insan akademis yang jauh dari kepentingan sesaat. Apalagi kepentingan itu bernama politik dan kekuasaan yang tidak akan pernah langgeng.

Kaum intelektual harus bekerja secara profesional sebagai konsultan politik dan peneliti sehingga nasihat dan hasil penelitiannya bukan hanya bermanfaat untuk kesuksesan pasangan capres dan cawapres tertentu. Tetapi, yang jauh lebih penting adalah menjadikan hasil kajian itu bermanfaat bagi masa depan bangsa dan negara. Tegasnya, kaum intelektual harus bekerja dengan dilandasi oleh komitmen moral dan kemanusiaan, bukan sekedar kepentingan jangka pendek.

Harapan untuk menjadikan kaum intelektual bekerja secara obyektif, profesional, dan tidak partisan tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Kaum intelektual yang terlibat dalam berbagai kegiatan tim sukses pasangan capres dan cawapres pada saat tertentu jelas mengalami kebimbangan antara menjadi akademisi murni atau akademisi sekaligus politisi. Apalagi mereka telah mendapat berbagai fasilitas dan penghasilan yang tinggi.

Tetapi, inilah ujian sesungguhnya bagi seorang intelektual. Jika ia memilih menjadi intelektual independen maka seringkali posisi ini tidak cukup menguntungkan karena pemikirannya pasti berada di luar sistem sehingga tidak dapat mewarnai kebijakan. Akan sangat berbeda jika ia masuk dalam pusaran kekuasaan. Dalam posisi ini kaum intelektual akan dapat merealisasikan gagasannya sebagai wujud tanggung jawab sosial keilmuan.

Pilihan menjadi intelektual-politisi akan menjadikan seorang akademisi tidak hanya berada di puncak menara gading, melainkan langsung terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan banyak orang. Tampaknya alasan inilah yang dipilih oleh kaum intelektual untuk terlibat dalam proses politik pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam konteks ini maka para akademisi yang berada di balik capres dan cawapres tidak dapat dianggap melakukan pengkhianatan intelektual.

Yang perlu diingatkan pada kaum intelektual adalah agar tetap menjaga kredibilitasnya sebagai akademisi. Sebab, prinsip kerja dalam dunia keilmuan jelas berbeda dengan dunia politik. Dikatakan bahwa seorang ilmuwan itu bisa saja melakukan kesalahan dalam menganalisa dan mengambil kesimpulan terhadap suatu fenomena.

Tetapi seorang ilmuwan tidak diperbolehkan berbohong, apalagi berusaha menyembunyikan fakta yang terjadi. Sementara dunia politik mentolelir seorang politisi untuk berbohong. Yang tidak boleh dilakukan politisi adalah berbuat salah. Dunia keilmuan juga mengharuskan seseorang untuk berbicara dengan bahasa yang jelas. Sementara dunia politik mentradisikan seseorang untuk berbicara dengan bahasa bersayap dan multitafsir.

Berkaitan dengan sikap dasar keilmuan yang tidak boleh mentolelir kebohongan itulah publik dikejutkan fenomena perang survei menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden. Publik telah disuguhi hasil survei beberapa lembaga mengenai elektabilitas pasangan capres dan cawapres dengan perbandingan yang sangat jauh. Padahal waktu pelaksanaan survei sangat berdekatan.

Terlepas adanya perbedaan metodologi yang digunakan, tetapi mencermati hasil survei yang dipublikasikan sepertinya patut dipertanyakan keakuratannya. Hasil survei pertama dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan pasangan SBY-Boediono unggul dengan raihan suara 70 persen, disusul Mega-Prabowo (18 persen), dan JK-Wiranto (7 persen). Untuk diketahui, survei ini dibiayai oleh Fox Indonesia yang sekaligus menjadi lembaga konsultan politik pasangan SBY-Boediono.

Hasil survei LSI tersebut berbeda jauh dengan temuan Lembaga Riset Informasi (LRI) yang meski menempatkan pasangan SBY-Boediono unggul, tetapi keunggulan ini sangat tipis (33,02 persen) dibanding JK-Wiranto (29,28 persen). Pelaksana survei LRI ini adalah Johan Silalahi, yang masuk dalam tim pencitraan pasangan JK-Wiranto. Tim Kampanye Nasional (TKN) Megawati-Prabowo juga melakukan riset serupa. Meski tidak menyebut angka pasti, tetapi hasil riset TKN menunjukkan urutan peringkat, yakni SBY-Boediono, Mega-Prabowo, dan JK-Wiranto.

Ditambahkan oleh TKN bahwa raihan suara tiga pasangan ini berbeda sangat tipis. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah hasil survei mana yang layak dipercaya? Apakah survei yang sejatinya dijalankan oleh kaum intelektual yang tergabung dalam tim konsultan, kajian, dan periset dari pasangan capres dan cawapres telah tereduksi oleh kepentingan politik kekuasaan?

Beberapa pertanyaan tersebut seharusnya tidak muncul ke permukaan jika kaum intelektual mampu menjaga tradisi akademisnya. Karena itu patut dipesankan pada kaum intelektual yang terlibat dalam tim sukses pasangan capres dan cawapres agar tidak merekayasa data dan fakta. Sebab, pemutarbalikan data dan fakta merupakan pelanggaran moral yang sangat duku-
tuk oleh dunia keilmuan.

Seorang intelektual dalam bekerja juga tidak boleh mengabdikan pada suatu golongan tertentu, melainkan harus mengabdikan pada kemanusiaan. Sementara masalah kemanusiaan bagi seorang ilmuwan jelas tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karakter inilah yang menjadikan ilmu bersifat universal.

PERAN AGAMA MENCEGAH HIV/AIDS

Tanggal 1 Desember selalu diperingati oleh berbagai elemen masyarakat sebagai hari AIDS dunia. Ada baiknya momentum ini digunakan untuk menyadarkan kita betapa penyakit HIV/AIDS kian berbahaya. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2011, dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penularan HIV tercepat di Asia Tenggara. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga memaparkan data penderita HIV kini mencapai 66.600 orang, serta 26.400 penderita AIDS.

Yang menyedihkan, 70 persen penderita HIV/AIDS adalah mereka yang berusia produktif. Data ini hanya berdasarkan pada kasus yang terekam di rumah sakit dan puskesmas. Padahal kasus HIV/AIDS sering diibaratkan seperti fenomena gunung es. Artinya, kasus yang tidak terkemuka dipastikan lebih banyak.

Untuk mencegah penyebaran virus HIV jelas dibutuhkan pendekatan yang holistik. Salah satunya adalah pendekatan agama. Pendekatan agama disini harus mampu memberikan perspektif baru terhadap fenomena HIV/AIDS. Sebab, sejauh ini jika agama digunakan untuk memahami fenomena HIV/AIDS maka yang muncul adalah pandangan hitam putih. Misalnya, dikatakan bahwa HIV/AIDS merupakan penyakit kutukan Tuhan. Akibatnya berkembang stigma negatif terhadap penderita HIV/AIDS. Selanjutnya muncul marginalisasi penderita HIV/AIDS dari kehidupan masyarakat.

Dalam ajaran moral agama (Islam) dikemukakan banyak tuntunan agar kita berakhlak mulia. Misalnya, dikatakan bahwa kita harus menghindari seks bebas (*walaa taqrabu al-zinaa inna-*

huu kaana faakhisyah wa saa'a sabiilaa); setiap yang memabukkan itu *khamr* dan setiap yang memabukkan itu haram (*kullu muskir khamr wa kullu muskir haram*); dan janganlah kamu mencampakan dirimu ke dalam kerusakan (*walaa tulquu bi aydikum ilaa al-tahlukah*). Beberapa ajaran ini jika ditaati tentu sudah lebih dari cukup untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat mendatangkan kemudharatan. Sebab, jika dicermati maka penyebab utama penyebaran virus HIV/AIDS adalah seks bebas dan narkoba.

Persoalannya, belum semua orang mampu menjadikan agama sebagai rujukan dalam berperilaku. Yang ideal tentu dengan beragama orang akan menjadi lebih baik. Tetapi secara jujur harus diakui bahwa keberagamaan seringkali merupakan proses yang panjang. Ini berarti, untuk menjadi baik seseorang seringkali mengalami jalan berliku. Dalam proses menjadi orang baik itulah seseorang terkadang tergoda melakukan perbuatan maksiat.

Realitas juga menunjukkan sebagian umat beragama bersifat nominalis. Mereka mengaku beragama tetapi dalam kenyataannya belum berperilaku yang baik. Tipologi masyarakat ini berpotensi untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama sehingga terkena virus HIV. Ini berarti umat harus diajak untuk mengamalkan ajaran agama secara sungguh-sungguh. Sebab, agama mengajarkan apa yang disebut *'uqubat al-fitrah* (hukuman atas pelanggaran fitrah). Dalam hal ini, HIV/AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ajaran agama dan fitrah manusia.

Sebagian tokoh agama ada yang menganjurkan untuk menggunakan kondom sebagai usaha mengurangi penyebaran virus HIV. Wacana ini kemudian menimbulkan kontroversi. Pandangan ulama pun terbelah menjadi dua. Pandangan pertama menyatakan bahwa penggunaan kondom haram hukumnya karena dapat menyuburkan seks bebas. Dengan kondom orang akan merasa aman dari penyakit sehingga bebas datang ke prostitusi. Bahkan kampanye penggunaan kondom yang digunakan bukan dari pasangan suami istri dapat dikategorikan; *amar munkar nahi makruf* (mendorong kemunkaran dan mencegah kebaikan).

Pandangan *kedua* menyatakan bahwa penggunaan kondom dapat digunakan mencegah bahaya yang lebih besar. Dalam perspektif kelompok ini penggunaan kondom merupakan keniscayaan untuk menanggulangi HIV/AIDS. Seorang ulama dari Mesir, Syaikh Mahmud Syaltut, termasuk yang berpandangan demikian. Ia menyatakan bahwa hubungan di luar nikah dengan tidak menggunakan kondom tergolong *haramun ghairu amin* (haram yang membahayakan). Sedangkan hubungan seksual di luar nikah dengan menggunakan kondom termasuk *haramun amin* (haram yang aman). Meski mengundang kontroversi, tetapi dalam menyikapi perkembangan HIV/AIDS pandangan ini dapat menjadi alternatif jangka pendek.

Dalam kasus HIV/AIDS yang perlu dicegah adalah agar penyakit ini tidak menyebar ke banyak orang. Karena itu penggunaan kondom menjadi jalan keluar. Apalagi sejauh ini secara teoritis kondom merupakan alat yang dapat digunakan untuk meminimalisir penularan virus HIV. Sebagian orang menyatakan bahwa untuk mencegah penyebaran virus yang mematikan ini dapat ditempuh dengan jalan pembinaan keagamaan. Tetapi yang juga perlu diingat, bahwa dalam proses pembinaan itu seringkali dijumpai kelompok masyarakat yang terlalu longgar pada nilai-nilai moral keagamaan.

Menunggu agar orang bertaubat sehingga menjadi orang yang taat dan religius tentu membutuhkan waktu. Sementara waktu terus berjalan dan virus HIV pun memakan banyak korban. Apalagi penderita HIV/AIDS tidak selalu orang yang jahat. Dalam banyak kasus, orang yang baik pun terserang virus HIV karena secara tidak disadari tertular dari orang lain. Bahkan anak-anak juga berpotensi terkena virus HIV karena tertular dari ibunya yang lebih dulu dinyatakan positif sebagai orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Dalam situasi dilematis ini pilihan menggunakan kondom menjadi alternatif. Dikatakan oleh Malik Badri, seorang doktor bidang psikologi dari Sudan, bahwa tidak ada satu masyarakat pun yang secara total mampu menghilangkan hubungan seks ilegal. Karena itu, sikap menolak penggunaan kondom secara total berarti sama saja dengan membiarkan seseorang dengan mudah

terjangkit virus HIV. Pandangan Malik Badri ini sejalan dengan kaidah dalam ushul fikih yang menyatakan bahwa jika ada dua kerusakan maka perlu diperhatikan adalah mana yang lebih besar kerusakannya, kemudian diambil yang paling ringan kerusakannya.

Ajaran agama yang juga perlu dikedepankan adalah sikap terhadap orang yang terkena HIV/AIDS. Dalam ajaran agama ditemukan banyak tuntunan agar seseorang bersikap saling menolong dan mencintai terhadap sesama. Ini berarti kita harus mengembangkan sikap empati pada penderita HIV/AIDS. Harus dipahami, bahwa virus HIV tidak akan menular melalui interaksi sosial seperti berjabat tangan, bermain bersama, berenang bersama, dan menggunakan alat makan minum secara bergantian. Karena itu, tidak ada halangan bagi kita untuk berinteraksi sosial dengan ODHA.

MENANTI KEBANGKITAN KAUM MUDA

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati hari kebangkitan nasional (Harkitnas). Peringatan Harkitnas didasarkan pada pendirian organisasi Budi Utomo oleh Dokter Wahidin Sudirohusodo dan beberapa pelajar sekolah dokter pada 20 Mei 1908. Meski banyak menunjukkan sifat Jawa dan baru pada 1930 mulai membukakan pintunya bagi orang-orang dari luar Jawa, namun tanggal pendirian Budi Utomo dianggap sebagai permulaan kebangkitan nasional. Yang menarik disimak adalah kiprah kaum muda yang terlibat dalam gerakan kebangsaan melalui organisasi Budi Utomo.

Fakta tersebut membuka kesadaran kita betapa kaum muda selalu berperan dalam berbagai peristiwa yang menentukan perjalanan bangsa. Bahkan melalui teori siklus 20 tahunan kita menyaksikan kiprah kaum muda dalam sejarah pembangunan bangsa. Hal ini dapat diamati melalui beberapa peristiwa bersejarah yang menunjukkan peran penting kaum muda sebagai pendorong perubahan. Siklus 20 tahunan itu dapat diamati mulai era kebangkitan nasional (1908), sumpah pemuda (1928), proklamasi kemerdekaan (1945), pergerakan mahasiswa (1966), dan reformasi (1998).

Meski baru menunjukkan hasil pada 1998, kiprah kaum muda sesungguhnya telah dimulai sejak pertengahan 1980-an. Saat itu, kaum muda yang direpresentasikan oleh kekuatan mahasiswa seakan tidak pernah lelah untuk memberikan koreksi dan kritik terhadap rezim Orde Baru. Era reformasi yang kemudian menggantikan Orde Baru dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai akumulasi dari berbagai koreksi dan kritik tersebut.

Kiprah kaum muda yang tergambar dalam siklus 20 tahunan tersebut menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya memiliki kul-

tur keilmuan serta keterampilan berorganisasi dan membangun jaringan yang sangat hebat. Sangat disayangkan, kultur tersebut seakan tenggelam dalam hiruk pikuk politik sepanjang era reformasi. Bahkan kita menyaksikan adanya penguatan interes politik di kalangan kaum muda. Kaum muda masa kini lebih menunjukkan minat dalam bidang politik dengan menjadi aktivis partai, anggota legislatif, dan tim sukses calon dalam pemilihan kepala daerah. Sementara kiprah kaum muda yang bergerak melalui jalur kultural terasa sekali kurang mendapat tempat.

Keterlibatan kaum muda dalam politik menemukan momentum yang tepat seiring dengan kebijakan multipartai. Bahkan dinamika politik lokal di daerah juga memberikan ruang yang terbuka bagi kaum muda untuk berkiprah di jalur politik. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kini telah terjadi peningkatan “syahwat politik” di kalangan kaum muda. Peningkatan syahwat politik ini tidak hanya terjadi di daerah, melainkan juga dalam skala nasional. Di antara indikatornya adalah bergabungnya sebagian intelektual muda dalam kepengurusan partai politik. Padahal mereka sebelumnya dikenal sebagai intelektual muda yang independen. Elit partai pun seakan berlomba mengajak kaum muda dengan memberikan jabatan penting. Targetnya, mereka dapat dijadikan sumber energi untuk menarik pemilih pemula.

Sebagai konsekuensi adanya peningkatan syahwat politik kaum muda, maka kiprah dan perjuangan mereka pun banyak disalurkan melalui berbagai aktivitas politik. Fenomena ini jelas menunjukkan bahwa sebagian kaum muda telah tergoda dengan kehidupan politik yang dianggap lebih menjanjikan masa depan. Akibatnya, kultur keilmuan dan daya kritis yang semestinya menjadi ruh perjuangan kaum muda terus tergerus.

Yang terjadi kemudian adalah budaya loyal pada pimpinan partai. Peningkatan interes politik kaum muda juga memunculkan kultur mudah berpecah sebagai konsekuensi dari perbedaan pilihan politik. Perjuangan kaum muda pun tidak lagi didasarkan pada kepentingan jangka panjang, melainkan untuk tujuan pragmatis-jangka pendek.

Pilihan sebagian kaum muda untuk berkiprah melalui jalur politik mengakibatkan capaian perjuangan melalui jalur kultural tidak terlalu

menonjol. Padahal kalau dipikirkan, wilayah perjuangan di bidang politik jelas sangat sempit dengan peminat yang sangat banyak. Akibatnya, tidak semua orang memperoleh pembagian kue kekuasaan. Sementara perjuangan di ranah kultural memiliki cakupan area yang luas dengan peminat sangat sedikit. Maka, setiap orang yang ingin berjuang di jalur kultural pasti mendapatkan peran.

Pilihan sebagian kaum muda untuk berkiprah di ranah politik jelas merupakan hak yang paling asasi. Karena itu, pilihan mereka untuk menjadi aktivis partai harus dipandang sebagai hak politiknya. Tetapi, persoalan akan muncul jika pilihan kaum muda yang berkiprah di bidang politik praktis menjadi yang terutama (*mainstream*). Sebab, dalam kondisi seperti ini perjalanan kaum muda akan selalu diwarnai intrik dan tarik-menarik kepentingan politik. Akibatnya, akan terjadi peningkatan mobilisasi sumber daya kaum muda untuk kepentingan politik praktis.

Tentu saja keadaan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi perjuangan kaum muda di masa mendatang. Hal ini karena dalam politik praktis selalu terdapat kultur berpecah dan memecah. Kultur semacam ini terbangun melalui pandangan politisi yang selalu menyatakan bahwa Si A adalah kawan dan Si B adalah lawan. Hampir tidak pernah dijumpai politisi yang berpandangan Si A adalah kawan dan Si B adalah sahabat. Di dalam politik juga ada hukum yang tak terelakkan, bahwa tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi.

Sebagian kaum muda juga berpikiran bahwa berkiprah melalui jalur politik akan dapat memberikan harapan yang instan untuk meraih kekuasaan, kemapanan, status sosial, dan kecukupan materi. Sementara berjuang melalui jalur kultural seringkali dianggap merupakan investasi jangka panjang yang melelahkan, penuh perjuangan, dan hasilnya baru dapat dinikmati kemudian.

Menyikapi berbagai pilihan tersebut, maka tidak seharusnya seluruh energi kaum muda dihabiskan untuk berkiprah melalui jalur politik. Harus ada komitmen sebagian dari mereka untuk tetap berkiprah di jalur kultural sebagai intelektual, peneliti, dan pekerja sosial lainnya. Melalui peringatan Harkitnas kita layak berharap agar kaum muda bangkit dan berbagai peran untuk menekuni perjuangan dalam ranah politik dan kultural.

KEMERDEKAAN RI DAN SPIRIT RAMADAN

Di antara karya besar bangsa ini yang lahir pada Ramadan adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Diceritakan bahwa Sukarno-Hatta yang saat itu diakui sebagai pemimpin terkemuka telah menjadi sasaran penculikan para pemuda. Dwitunggal itu dipaksa bertindak “Atas Nama Bangsa Indonesia” untuk menyatakan kemerdekaan.

Jika melihat kilas balik perjuangan bangsa, maka jelas sekali kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah. Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan seluruh komponen bangsa. Dalam sudut pandang sejarah Indonesia modern dikatakan bahwa kemerdekaan itu diraih melalui proses yang sangat panjang. Perjuangan telah dimulai sejak masa kebangkitan nasional (1908), Sumpah Pemuda (1928), dan puncaknya adalah keberhasilan meraih kemerdekaan (1945).

Proklamasi kemerdekaan pada bulan Ramadan dapat dijadikan spirit agar kita tidak bermalas-malasan. Ini penting ditekankan karena Ramadan seringkali dijadikan alasan sebagian orang untuk mengurangi produktifitas. Padahal Ramadan secara bahasa berarti membakar atau mengasah. Dimaknai demikian karena ia dapat dijadikan umat untuk membakar dosa dan kesalahan dengan cara mendekatkan diri pada Allah.

Menurut Quraish Shihab (2000), Ramadan dapat diibaratkan tanah subur yang siap ditaburi benih-benih kebaikan. Semua orang dipersilahkan menabur hingga pada saatnya menuai hasil sesuai dengan benih yang ditanamnya. Sejalan dengan semangat

Ramadan berarti kita harus mengisi kemerdekaan dengan bekerja keras dan berkreasi.

Spirit untuk bekerja keras dan berkreasi terasa sejalan dengan pernyataan Allah bahwa Dia terus berada dalam kesibukan (QS. al-Rahman: 29). Melalui kerja keras inilah kita menyaksikan banyak karya besar yang dihasilkan Nabi Muhammad dan sahabat pada bulan Ramadan: kemenangan Perang Badar dan penaklukan Kota Makkah. Sejarah keemasan Islam juga diwarnai prestasi hebat yang terjadi pada Ramadan, seperti keberhasilan menaklukkan Spanyol dan kemenangan dalam Perang Salib. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Ramadan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kerja keras dan produktivitas.

Jika bercermin pada kondisi yang dihadapi bangsa ini, tampak bahwa masih banyak persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Karena itulah kita perlu meneladani Rasul dan para sahabat tatkala menghadapi situasi yang sangat sulit pada waktu Perang Badar. Pada Ramadan tahun kedua hijriah, Nabi memimpin pasukan yang berkekuatan 305 orang dengan 70 kendaraan unta meninggalkan Madinah menuju Badar.

Jarak perjalanan diperkirakan 150 kilo meter. Mengingat sulitnya medan dan terbatasnya sarana transportasi, setiap ekor unta dinaiki tiga atau empat orang secara bergantian. Nabi pun mendapatkan bagian yang sama dengan sahabat lain. Selama perjalanan para sahabat beberapa kali menawari Nabi dengan kendaraan khusus satu ekor unta. Tetapi, tawaran itu ditolak Nabi dengan alasan bahwa pada masa sulit yang dibutuhkan adalah kebersamaan.

Rasanya inilah teladan yang perlu dijadikan spirit bagi pemimpin dalam menghadapi persoalan bangsa yang demikian kompleks. Teladan Nabi jelas menunjukkan bahwa tidak pantas seorang pemimpin meminta fasilitas saat rakyat sedang menghadapi berbagai kesulitan. Ini berarti pemimpin harus berempati pada keadaan rakyatnya, terutama mereka yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi.

Dalam Perang Badar juga diungkapkan betapa penting dukungan rakyat pada pemimpin yang mau berjuang untuk kepentingan masa depan. Tatkala pasukan muslim berhadapan dengan

pasukan Quraisy yang berkekuatan hampir 1000 orang dengan fasilitas transportasi unta yang berlimpah, Nabi sempat meminta pendapat pada sahabat. “Wahai para sahabat, berikanlah padaku saran dan pertimbangan. Kita terus maju melawan pasukan Quraisy atau sebaliknya?”

Seorang sahabat dari golongan Muhajirin bernama Miqdad bin Amir maju dan berkata; “Rasulullah, teruskan apa yang diperintahkan Allah. Kami akan tetap berjuang bersama tuan. Kami tidak akan bersikap seperti Bani Israil pada Nabi Musa yang mengatakan; Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah”. Komitmen serupa juga ditegaskan Sa’ad bin Mu’adz dari golongan Anshar. Dukungan para sahabat terhadap Nabi ini penting dijadikan teladan. Kita harus memberikan dukungan pada pemimpin sepanjang berjuang untuk kepentingan rakyat. Sebaliknya, kita harus mengingatkan pemimpin yang hanya berjuang untuk keluarga dan kelompoknya.

Bermodalkan dukungan para sahabat itulah Nabi memimpin Perang Badar dengan penuh semangat. Bahkan untuk menguatkan keyakinan dalam berjuang, sejenak Nabi menghadapkan wajah ke kiblat guna bermohon pada Allah agar diberikan pertolongan. Dengan perjuangan dan bantuan Allah maka Nabi dan para sahabat pun berhasil menaklukkan Quraisy (QS. al-Anfal: 9).

Kejadian dalam Perang Badar memberikan pelajaran bahwa untuk mengatasi problem yang dihadapi, seorang pemimpin harus senantiasa mendekati diri pada Tuhan. Kedekatan pada Tuhan ini penting karena dapat memberikan keyakinan dan energi yang luar biasa untuk keluar dari berbagai persoalan. Bukankah saat ini kita sedang menghadapi berbagai persoalan sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan politik? Rasanya jika kita tidak segera berhasil mengatasi problem tersebut maka bangsa ini akan benar-benar menjadi negara gagal (*failed state*).

Karena itulah kita berharap semoga para pejabat publik negeri ini dapat menjadikan Ramadan sebagai spirit untuk mengisi kemerdekaan dengan bekerja keras berasaskan kebersamaan dan kedekatan pada Tuhan. Jika itu yang dilakukan maka dukungan rakyat, baik diminta atau tidak, pasti akan diberikan.

MENDORONG MUNCULNYA CALON PEREMPUAN

Membincangkan peran sosial kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kini sudah tidak lagi tabu. Faktanya, sudah banyak contoh perempuan yang telah berhasil meraih kesuksesan dengan menempati posisi penting dalam urusan publik (*public sphere*). Misalnya, sebagai politisi, pebisnis, pendidik, aktivis sosial, dan kelompok profesional lain. Ini berarti kaum perempuan telah merambah jauh dengan menekuni bidang di luar urusan domestik (*domestic sphere*).

Fenomena tersebut jelas menjadi antitesa dari gambaran perempuan yang sering ditampilkan dalam posisi termarginalkan, tersubordinasi, dan inferior, jika dibandingkan laki-laki. Perempuan seringkali dikatakan sebagai korban dalam banyak kasus kekerasan rumah tangga dan dieksploitasi oleh media. Perempuan juga dicitrakan sebagai makhluk yang lemah lembut, irasional, mendahulukan perasaan, tidak berdaya, pasrah, mudah menangis, dan *nrimo*. Bahkan perempuan sering digambarkan dalam masyarakat tradisional sebagai kaum yang hanya bekerja di sekitar sumur, dapur, dan kasur. Sudut pandang yang patriarkhi ini tentu tidak menguntungkan bagi kaum perempuan.

Berbeda dengan pandangan tersebut, konstruk kaum perempuan dalam kaitan dengan usaha membangun tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ternyata harus diperhitungkan. Perempuan dengan kelebihan yang dimilikinya, diyakini dapat memainkan perana yang cukup signifikan. Apalagi kaum perempuan telah diberi anugerah oleh Allah berupa struktur biologis dan psikologis yang berbeda dengan kaum laki-laki.

Bermodal dari kelebihan yang dimiliki inilah diharapkan dapat membantu tugas kaum perempuan. Bahkan dengan kelembutannya, perempuan dapat dikatakan memiliki kekuatan lunak (*soft power*) yang sangat dasyat. Ini berarti sesungguhnya kaum perempuan dapat diposisikan sebagai salah satu kekuatan untuk melakukan perubahan sosial melalui keikutsertaannya dalam proses politik. Salah satunya adalah pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan secara langsung.

Pilihan Strategi

Menurut agenda KPU Jatim, pada 2010 akan digelar pilkada di 18 kabupaten/kota. Salah satu yang menarik ditunggu adalah pemilihan walikota (pilwali) Surabaya. Dengan model pemilihan langsung oleh rakyat maka siapa pun dapat maju, baik melalui kendaraan partai politik maupun jalur independen. Termasuk dalam hal ini adalah figur perempuan yang selama ini disebut warga metropolis layak maju dalam pilwali Kota Surabaya. Misalnya, Tri Rismaharini, Efie Findiarti, Yulyani, Emy Susanti, dan Fairuz Ahmad (*Metropolis JP*, 28/12/2009). Mereka ini jelas sangat layak diperhitungkan jika mau maju dalam pilwali Kota Surabaya, baik sebagai wali kota maupun wakil wali kota.

Sebagian dari mereka sudah sangat populer di kalangan warga metropolis. Misalnya, Tri Rismaharini yang pernah sukses memimpin Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Karya Tri Rismaharini yang sangat dirasakan warga kota adalah pengadaan hutan kota dan pertamanan. Saat ini posisi Tri Rismaharini pun sangat vital, yakni Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya.

Nama populer yang juga pantas disebut adalah Yulyani, mantan anggota DPRD Surabaya (1999-2004) yang terbilang vokal dan bersih. Sementara, Efie Findiarti, Emy Susanti, dan Fairuz Ahmad, terdengar masih asing. Sebenarnya, ada nama lain yang juga layak diperhitungkan. Yakni, Esti Martiana Rachmie, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Kapasitas Esti Martiana Rachmie dalam memimpin Dinas Kesehatan tidak diragukan lagi. Bahkan bagi media, ia menjadi salah satu *news maker* sehingga sangat populer.

Persoalannya kini berpulang pada keseriusan para srikandi tersebut untuk maju dalam pilwali Kota Surabaya. Menurut saya,

paling tidak ada tiga variabel penting yang harus dilakukan agar figur yang menjadi *inspiring woman* tersebut sukses. *Pertama*, mereka harus diusung oleh partai-partai besar dan memiliki jaringan mesin politik yang kuat hingga ke basis massa.

Untuk menentukan partai-partai besar, maka cara mudah yang dapat dilakukan adalah dengan melihat perolehan kursi DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. Ini berarti partai besar seperti Demokrat, PDIP, PKB, PKS, dan Golkar, layak dipertimbangkan sebagai kendaraan politik. Perolehan suara pada saat pemilu legislatif dan kekuatan jaringan merupakan jaminan bahwa siapa pun yang diusung partai-partai besar berpotensi menang.

Kedua, figur-figur perempuan tersebut harus menggandeng atau berpasangan dengan calon yang merepresentasikan simbol-simbol ideologi yang berbeda. Misalnya, representasi ideologi nasionalis-agamis. Betapapun, politik ideologi ini masih relevan dipertimbangan dalam mempengaruhi emosi calon pemilih. Ini berarti pasangan yang menunjukkan representasi ideologi diharapkan dapat mengakomodasi pemilih yang masih menunjukkan ikatan emosional.

Ketiga, figur-figur perempuan tersebut harus mendapat dukungan dari sebanyak mungkin kelompok yang ada di masyarakat. Misalnya, paguyuban, asosiasi profesi, organisasi sosial keagamaan, NGO, dan kelompok primordial. Semakin banyak mendapat dukungan dari kelompok masyarakat maka akan memberi peluang bagi figur perempuan untuk memenangkan pilwali Kota Surabaya.

Mengapa Perempuan?

Salah satu pertanyaan penting yang perlu dijawab berkaitan dengan pilwali Kota Surabaya dan pilkada di beberapa kabupaten/kota Jatim adalah mengapa figur perempuan layak diperhitungkan? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan beberapa sudut pandang.

Pertama, secara sosial budaya pandangan masyarakat terhadap perempuan sudah banyak berubah. Saat ini telah terjadi perkembangan sikap hidup yang mendorong terwujudnya egali-

tarianisme dan kesetaraan peran kaum perempuan dan laki-laki. Dalam posisi seperti ini kaum perempuan juga memiliki peran yang penting untuk ikut serta menentukan perubahan sosial. Kaum perempuan kini dapat berkiprah secara lebih leluasa dalam ranah publik dan domestik. Apalagi beberapa figur perempuan telah menunjukkan prestasi luar biasa jika diberikan amanah untuk memimpin lembaga publik tanpa harus melupakan tanggung jawabnya dalam urusan domestik.

Kedua, secara politik keterlibatan perempuan pun terbuka lebar. Bahkan sistem politik kita mengusung mekanisme representatif gender di legislatif. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, telah mengamanatkan agar setiap partai politik peserta pemilu mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Ketentuan dalam perundang-undangan ini jelas menjadi jaminan bagi perempuan untuk berkiprah di dunia politik.

Ketiga, kiprah perempuan di dunia politik telah menunjukkan nilai marketing yang luar biasa. Fenomena Khofifah Indarparawansa dalam pemilihan Gubernur Jatim 2008 telah menjadi bukti betapa kaum perempuan dapat menjadi ancaman bagi dominasi kaum laki-laki dalam dunia politik dan pemerintahan. Demikian juga dengan kemenangan mutlak Prof. Istibsyaroh dalam pemilu 2009 untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mewakili Jatim. Dua fenomena ini jelas dapat menjadi pelajaran politik yang berharga betapa perempuan layak dipertimbangkan dalam pilkada.

Keempat, dalam banyak hal perempuan telah terbukti memiliki kekuatan yang efektif untuk mempengaruhi kaum laki-laki. Kaum perempuan dapat menjadi pusat perhatian bagi lawan jenisnya. Faktanya, dalam banyak kegiatan periklanan selalu menempatkan kaum perempuan sebagai model yang dijadikan daya tarik.

Kelima, dalam kenyataannya total populasi kaum perempuan jauh melebihi kaum laki-laki sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai sensus penduduk. Seiring dengan fakta ini, jumlah

pemilih perempuan pun menunjukkan angka yang lebih banyak dibanding laki-laki.

Keenam, bahwa sedikit sekali kaum perempuan yang berpikir individualistik. Mereka umumnya memiliki sikap hidup yang komunalistik. Perempuan biasanya sangat mudah dikenali melalui keterlibatannya dalam perubahan mode sesuai dengan perkembangan *style* dan *fashion*. Meski tidak saling mengenal, perempuan sesungguhnya telah berkenalan dan saling menyapa melalui *fashion* tersebut. Kaum perempuan juga memiliki tabiat senang berkumpul dan berorganisasi. Tabiat dasar ini jelas menjadi modal berharga untuk memobilisasi potensi perempuan.

Beberapa alasan ini kiranya dapat menjelaskan mengapa calon perempuan perlu diperhitungkan dalam pilkada. Tugas kita sekarang adalah mendorong figur-figur perempuan terbaik untuk ikut *running* dalam pilkada kabupaten/kota di Jatim.

ZAKAT UNTUK PRODUKTIFITAS UMAT

Di antara ibadah yang dianjurkan selama Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Anjuran ini termaktub dalam beberapa hadits Nabi Muhammad. Misalnya, beliau menyatakan bahwa sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan pada Ramadan. Pada kesempatan lain, Nabi juga menyatakan bahwa tangan di atas (pemberi) lebih baik dari tangan di bawah (peminta-minta). Islam mencela orang yang bermalasma-lasan, meminta-minta, dan tidak mau bekerja keras. Beberapa ajaran ini tentu dapat dijadikan spirit umat untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) selama Ramadan.

Jika kita amati praktik pengeluaran ZIS di tengah-tengah masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa umumnya dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, pembayar zakat (*muzakki*) secara langsung membagikan ZIS pada mereka yang berhak (*mustahiq*). Meski terkesan konvensional, cara ini masih menjadi pilihan sebagian orang. Tetapi, pembagian zakat model ini menyisakan persoalan karena dapat menimbulkan korban akibat penumpukan massa.

Kedua, pembayar zakat menyalurkan ZIS melalui lembaga amal. Cara ini dipandang lebih sesuai dengan spirit ajaran Islam sebagaimana dicontohkan Nabi dan para sahabat. Distribusi melalui amal juga dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas pembagian ZIS. Dengan demikian pembayar zakat dapat memercayakan penyaluran ZIS pada amal. Apalagi kini telah tersedia banyak amal zakat yang amanah, bertanggung jawab, transparan, dan profesional.

Berdasarkan hasil riset *Islamic Development Bank* (IDB) dikatakan bahwa potensi zakat di Indonesia pada 2010 mencapai

Rp. 100 triliun. Sementara pada 2011 potensi zakat diestimasi mencapai Rp. 217 triliun, dengan perincian Rp. 117 triliun dari rumah tangga dan Rp. 100 triliun dari perusahaan-perusahaan milik keluarga muslim.

Meski potensinya sangat besar, namun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyatakan bahwa realisasi pembayaran zakat pada 2010 baru mencapai Rp. 1,5 triliun. Ini berarti masih jauh dari potensi zakat sesungguhnya. Padahal pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Tetapi lagi-lagi kita menyaksikan betapa Undang-undang ini belum mampu melahirkan efek jera bagi orang yang tidak membayar zakat.

Karena itu untuk mengoptimalkan potensi zakat selama Ramadan, beberapa amil memilih cara lebih aktif dengan menyediakan *counter* zakat di kantor pemerintahan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan bank. Cara ini dapat dikatakan terobosan karena berupaya menjemput zakat dari pembayar zakat. Di *counter* tersebut pembayar zakat juga dapat berkonsultasi mengenai beberapa persoalan keagamaan, terutama yang berkaitan dengan zakat. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan ZIS. Cara ini juga berbeda dari kebanyakan amil zakat yang pasif dengan hanya membuka penerimaan ZIS di masjid.

Jika hasil riset IDB dijadikan pijakan, berarti potensi zakat tergolong sangat besar. Ini jelas menjadi tantangan bagi Baznas serta Badan Amil Zakat (BAZ) setiap provinsi, kabupaten dan kota, untuk mencari cara yang tepat guna memaksimalkan potensi zakat. Sebab, optimalisasi potensi zakat sangat berarti bagi peningkatan kesejahteraan umat, terutama untuk menangani problem kemiskinan dan pengangguran. Apalagi data Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan Indonesia masih sangat tinggi, mencapai 30,02 juta (Maret 2011).

Hingga mendekati akhir Ramadan, lembaga amil zakat pasti lebih sibuk karena harus juga mengelola zakat fitrah. Jika dikelola profesional, penerimaan ZIS dan zakat fitrah selama bulan Ramadan tentu sangat besar manfaatnya untuk memberdayakan umat. Sayangnya, pemanfaatan ZIS dan zakat fitrah sejauh ini masih banyak yang digunakan untuk kepentingan konsum-

tif. Penerima zakat cenderung menggunakan dana zakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lembaga amil juga belum banyak yang mengarahkan pemanfaatan zakat untuk peningkatan produktifitas seperti pemberian modal usaha, pengembangan unit produksi, dan pemberian beasiswa pendidikan.

Ironinya, ada sebagian orang kaya yang merasa bangga melihat fenomena terus bertambahnya kerumunan orang miskin yang antri menerima zakat di depan rumahnya. Fenomena ini dapat diamati di beberapa daerah saat orang-orang kaya itu membagikan zakatnya. Ini tentu menjadi potret yang aneh karena masih ada orang yang justru senang melihat peningkatan jumlah orang miskin. Bahkan dengan bangga mereka mengundang orang miskin datang ke rumahnya untuk diberi zakat. Hal ini jelas menjadi fenomena yang bertentangan dengan tradisi Islam. Karena seharusnya orang kaya itulah yang mendatangi fakir miskin untuk diberi zakat.

Sudah saatnya lembaga amil berusaha memaksimalkan pengelolaan zakat dengan cara yang lebih produktif. Harus diakui, bahwa menghilangkan tradisi pemanfaatan zakat untuk kepentingan konsumtif jelas membutuhkan waktu. Apalagi realitas menunjukkan bahwa masih banyak warga miskin yang membutuhkan penanganan langsung karena problem yang dihadapi bersifat riil.

Tetapi, harus diingat bahwa penanganan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan yang pragmatis. Strategi ini jelas tidak akan berhasil memberdayakan masyarakat miskin. Bahkan boleh jadi masyarakat miskin akan merasa nyaman dengan kemiskinannya. Sebab, dalam pikiran mereka pasti ada pihak yang memberi bantuan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Pada konteks inilah lembaga amil perlu mengalokasikan dana dari zakat untuk memberdayaan perekonomian umat. Masyarakat miskin harus didorong untuk cepat keluar dari kemiskinan dengan memberikan dana yang diambilkan dari zakat sebagai modal usaha atau pinjaman lunak. Dana ini harus digunakan sebagai modal usaha yang bermanfaat bagi kelanjutan kehidupannya. Untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sebagaimana mestinya, lembaga amil perlu mengajak elemen masyarakat guna mendampingi warga miskin hingga benar-benar berdaya.

MENGEVALUASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2006 tentang RKPD Jatim 2007 dikatakan bahwa prioritas program pembangunan adalah penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 17 persen dan pemenuhan kebutuhan pangan sebesar 78 persen. Berdasarkan pada peraturan ini persoalan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu agenda yang harus dilakukan pemerintah provinsi. Untuk menunjukkan komitmen di bidang ini beberapa waktu yang lalu Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meluncurkan program PAM-DKB (Program Aksi Menanggulangi Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan).

Sesuai dengan namanya program tersebut dimaksudkan untuk mengatasi problem kemiskinan yang melanda di berbagai daerah di Jatim sebagai akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Berdasarkan rencana kegiatan program ini akan digulirkan dan di-*launching* secara massif di 38 kabupaten/kota di Jatim. Hingga kini program ini telah mulai berjalan efektif di beberapa kabupaten/kota. Untuk mengimplementasikan program ini, dana yang dibutuhkan berasal dari sumber yang dialokasikan APBD Jatim serta dana *sharing* dari daerah kabupaten/kota dan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Tentu saja program PAM-DKB ini akan melengkapi program-program serupa yang telah ada atau sedang berjalan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin), Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Subsidi Raskin, Subsidi Kesehatan, dan lain-lain. Banyak pihak tentu berharap agar program-program pengentasan kemiskinan tersebut dapat mengurangi jumlah keluarga miskin yang tersebar di seluruh Jatim.

Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistika (BPS) Jatim, tampak jelas bahwa jumlah keluarga miskin pada tahun 2006 mengalami kenaikan pesat dibanding tahun 2005. Untuk diketahui, berdasarkan hasil sensus per September 2005 jumlah kepala keluarga miskin (Gakin) di Jatim terdata sebanyak 2.728.629 KK. Sementara data keluarga miskin per Januari 2006 dikatakan berjumlah sekitar 3.311.903 KK. Jika data tersebut dikelompokkan menjadi keluarga miskin bekerja dan keluarga miskin pengangguran, maka perbandingannya adalah 2.914.837 [bekerja] dan 397.066 [pengangguran] (*Data Base BPS Jatim, 13 Januari 2006*). Tentu saja jumlah Gakin di Jatim tersebut sudah tergolong sangat mengkhawatirkan sehingga membutuhkan solusi secepatnya.

Berkaitan dengan program PAM-DKB, dapat dikatakan bahwa program ini memang diharapkan dapat langsung menyentuh kebutuhan keluarga miskin di tingkat desa/kelurahan. Harapan tersebut tampaknya akan menjadi kenyataan jika konsep yang dicanangkan program ini berjalan optimal. Apalagi dari segi struktur organisasi pelaksana, program ini telah melibatkan banyak elemen masyarakat mulai dari pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, Pemkab/Pemkot, kecamatan, kepala desa/kelurahan hingga kelompok-kelompok keluarga miskin (Pok-Gakin) di setiap desa/kelurahan. Di samping itu juga dilibatkan lembaga-lembaga lain (LSM) sebagai pendamping/komite, yang turut melaksanakan, melakukan pendampingan, dan mengontrol kegiatan.

Sasaran dari program PAM-DKB adalah keluarga-keluarga miskin yang penentuannya dilakukan secara selektif berdasarkan usulan dari desa/kelurahan. Mereka yang termasuk keluarga miskin adalah Gakin pengangguran, Gakin setengah pengangguran, Gakin pekerja, dan Gakin dengan masalah khusus. Mereka inilah yang akan memperoleh berbagai fasilitas yang diluncurkan melalui program ini, seperti: (1) Padat Karya Desa (PKD) untuk menciptakan lapangan kerja; (2) Investasi (semacam modal ber-

gulir dan modal pinjaman dengan bunga rendah); (3) Penguatan pasar sebagai usaha membangun kemitraan yang kuat dan sehat antara UKM dan Gakin; serta (4) Pembinaan khusus bagi kelompok keluarga miskin usia lanjut dan cacat permanen (*permanent disability*).

Semua program PAM-DKB diharapkan dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip; *pertama* adalah aksestabel berarti bahwa seluruh aspek pengelolaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antarpelaku. Melalui prinsip ini diharapkan ada partisipasi aktif dari kelompok Gakin yang menjadi sasaran kegiatan. Sehingga dengan demikian mereka akan terberdayakan dan memberikan dukungan maksimal. Prinsip *kedua* adalah transparan yang berarti bahwa pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat terkendali dan terwujud.

Prinsip *ketiga* adalah akuntabel yang berarti bahwa pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara struktural dan sosial kepada masyarakat. Prinsip *keempat* adalah keterpaduan yang berarti bahwa semua kegiatan melibatkan antar komponen sehingga dapat saling menunjang dan melengkapi. Prinsip terakhir adalah keberlanjutan yang berarti bahwa hasil kegiatan harus dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan dalam jangka waktu relatif panjang.

Tetapi sangat disayangkan jika konsep implementasi program PAM-DKB yang demikian baik kemudian memunculkan aroma politik yang sangat kuat. Nuansa politis program ini misalnya dapat diamati dari individu-individu atau kelompok LSM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan program PAM-DKB. Bahkan dalam hal proses rekrutmen kelompok LSM yang dijadikan *associate member* pun tidak pernah dilakukan melalui proses lelang (tender) yang transparan dan akuntabel. Padahal program ini diperkirakan menelan anggaran lebih dari Rp. 425 miliar. Dana sebesar itu jelas merupakan uang rakyat karena sebagian besar memang diambilkan dari sumber APBD Provinsi Jatim dan APBD Kabupaten/Kota di seluruh Jatim.

Kesan lain yang bernuansa politis dari program PAM-DKB juga dapat diamati dari konteks pelaksanaan program yang memang sangat berdekatan dengan masa persiapan pemilihan gu-

bernur di Jawa Timur. Bahkan jika mengamati struktur organisasi pelaksana kegiatan, program ini jelas menampilkan figur yang sangat potensial menjadi salah satu calon gubernur. Apalagi figur tersebut dalam berbagai kesempatan telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgub.

Memang bisa saja dikatakan bahwa berdasarkan kultur birokrasi kita, penempatan seorang pejabat dalam sebuah even kegiatan menghendaki adanya penyesuaian dengan jabatannya di pemerintahan. Tetapi, langkah tersebut jelas akan menjadi *conflict of interest*. Sebab, tidak tertutup kemungkinan jika individu dan kelompok LSM yang terlibat dalam kegiatan ini kemudian memiliki agenda tersembunyi (*hidden agenda*) untuk kepentingan pragmatis-jangka pendek.

Maka tidak mengherankan jika kemudian muncul pertanyaan kritis; Apakah keterlibatan individu dan kelompok LSM dalam program PAM-DKB tersebut tidak dimaksudkan sebagai persiapan dalam rangka *running* Pilgub? Jawaban terhadap persoalan ini menurut hemat saya memang sangat sulit. Sebab, tradisi yang berkembang di masyarakat kita terkadang masih sulit membedakan hak milik pribadi dan hak milik publik. Sejak awal dikatakan bahwa program ini jelas didanai dari uang rakyat. Maka sudah selayaknya jika kita berharap agar program ini steril dari kepentingan politik (*political interest*) siapa pun.

Tetapi inilah inti persoalan yang sedang kita hadapi bersama bahwa seringkali ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kelompok-kelompok berkepentingan sering menunjukkan sikap yang kurang dapat membedakan urusan pribadi dan urusan publik. Mereka bahkan dengan mudah memanfaatkan berbagai fasilitas negara sebagai pejabat publik untuk kepentingan diri maupun kelompok. Ironinya kondisi ini masih diperparah dengan belum maksimalnya pengawasan publik.

Berkenaan dengan adanya program PAM-DKB yang sedang digulirkan untuk kelompok Gakin di seluruh desa/kelurahan di Jatim, tentu kita diharapkan dapat turut berperan aktif melakukan fungsi kontrol. Posisi masyarakat dalam hal ini sangat penting untuk memberikan jaminan bahwa program ini memang untuk memberdayakan Gakin, dan bukan malah membuat mereka

menjadi semakin bergantung. Sebab, terkadang ada kultur yang aneh pada sebagian masyarakat yang di antaranya ditunjukkan melalui sikap merasa *enjoy* dengan keadaannya yang miskin. Kondisi inilah yang barangkali dapat dinamakan dengan kemiskinan kultural. Tentu saja, tipikal masyarakat yang demikian tidak dapat dipersalahkan. Karena bisa jadi kondisi tersebut tercipta akibat kesalahan pendekatan yang dipilih dalam setiap program pengentasan kemiskinan.

Karena itulah kita sangat berharap agar program PAM-DKB pada akhirnya dapat menjauhkan kelompok Gakin dari kondisi kemiskinan kultural. Sehingga mereka merasa berdaya, serta memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi untuk dapat keluar dari keadaannya yang miskin. Berkaitan dengan keinginan tersebut, rasanya menjadi tugas kita semua untuk melakukan pengawasan. Sebab, sudah sekian banyak program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan, tetapi anehnya jumlah warga miskin dan pengangguran tetap saja meningkat pesat. Dan untuk kepentingan itu semua, *last but not least*, marilah kita mengawasi program PAM-DKB ini agar benar-benar bersih dari berbagai kepentingan politik.

MEWASPADAI KOMUNISME GAYA BARU

Secara historis, komunisme dapat dikatakan terlahir untuk merespon kebobrokan kapitalisme yang pada awal abad XX telah menimbulkan kesengsaraan luar biasa dalam masyarakat Eropa dan Amerika. Kapitalisme telah melahirkan kesenjangan sosial-ekonomi, keterasingan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Tegasnya, kapitalisme telah melahirkan tipologi masyarakat yang bebas memiliki alat-alat produksi secara pribadi, pemilik perusahaan bebas mencari keuntungan ekonomi melalui penghematan uang, mekanisme persaingan, dan rasionalisasi dalam mengelola perusahaan (Rodinso, 1982: 29).

Kapitalisme, seperti dikatakan Adam Smith, sangat menekankan pada persaingan dan permainan bebas pasar yang memiliki peraturan tersendiri. Bahkan kepentingan-kepentingan ekonomi harus dibiarkan berjalan sendiri agar perkembangannya berlangsung tanpa kendali pemerintah dan dengan regulasi sedikit mungkin (Bagus, 2000: 391).

Ideologi kapitalis tersebut mendapatkan kritik keras dari komunisme yang dalam doktrinnya sangat mendambakan suatu struktur sosial yang diurus secara bersama. Tema-tema seperti sosialisme, humanisme, tanpa kelas, dan kesejahteraan rakyat telah menjadi slogan komunisme. Ideologi komunisme dikaitkan dengan pikiran-pikiran Marx dan Engels. Keduanya menyatakan bahwa komunisme merupakan tahap akhir perkembangan masyarakat; suatu keadaan yang akan tercipta setelah tercapainya sosialisme.

Dalam pokok-pokok ajaran Marx dikatakan bahwa masya-

rakat berkembang dari komunisme primitif dan akan berakhir dengan digulingkannya negara. Jalan untuk mencapai keinginan tersebut harus menggunakan revolusi dan kediktatoran proletariat (Marx, 2004). Idealita komunisme tersebut ternyata hanya utopia. Yang dimaksud utopia di sini adalah keinginan yang tidak mungkin dapat direalisasikan kapan pun dan di mana pun (Mannheim, 1991: xix).

Disebut utopis, karena dalam kenyataannya janji manis komunisme tidak pernah terwujud. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, komunisme telah melahirkan persoalan baru dalam bentuk konflik sosial, kekejaman, dan perampasan terhadap hak-hak kemanusiaan. Keadaan inilah yang terjadi di banyak negara yang berideologi komunis.

Sejarah perkembangan ideologi komunis di Indonesia dapat dilacak sejak awal abad XX melalui tokoh-tokoh seperti Semaun, Alimin, Muso, dan Darsono. Mereka tergabung dalam *Indische Social Democratische Vereniging* (ISDV, Perkumpulan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Bahkan, Semaun berhasil menyusup ke Syarikat Islam (SI) dan melakukan *brainwashing* terhadap kader-kader SI. Ketika ISDV berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 23 Mei 1920, perjuangan dan manuver politiknya terus digalakkan.

Banyak tokoh dari berbagai latar belakang sosial mulai terpesona dengan ideologi komunis. Bahkan dalam sejarah perjuangan politik, PKI telah mencatatkan diri sebagai salah peserta Pemilu 1955 dengan raihan suara mencapai 16,36 persen dan menempati posisi empat besar di bawah PNI [22,32 persen], Masyumi [20,92 persen], dan NU [18,41 persen] (M. Asfar, 2006: 72). Dengan dukungan yang relatif besar itulah PKI mulai berusaha menanamkan pengaruh di berbagai elemen dengan jalan menjanjikan kesejahteraan dan keadilan sosial yang lebih baik.

Tetapi, faktanya PKI di Indonesia justru telah melahirkan keadaan yang sangat mengerikan. Sebagai bukti, pemberontakan PKI pada 1948 diwarnai dengan pembunuhan terhadap banyak tokoh agama. Padahal ketika itu bangsa Indonesia sedang disibukkan dengan usaha mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda. Pemberontakan G 30S/PKI pada 1965 juga menunjukkan kekejaman kaum komunis. Pada saat itu, beberapa peting-

gi TNI Angkatan Darat telah dibunuh secara keji. Tentu saja, pengalaman sejarah yang demikian tidak boleh dilupakan begitu saja. Seluruh elemen bangsa harus belajar dari pengalaman tersebut agar tidak mudah tergoda oleh janji-janji ideologi komunis.

Peringatan tersebut layak diberikan, sebab memberangus ideologi bukan pekerjaan mudah. Ideologi adalah seperangkat nilai yang dijadikan pedoman suatu gerakan yang merefleksikan moral, kepentingan, komitmen sosial, dan politik suatu gerakan (Ball dan Dagger, 1995: 9). Karena ideologi berkaitan dengan nilai-nilai yang dipedomani maka sifatnya menjadi laten dan sewaktu-waktu jika situasi dan kondisi memungkinkan akan bermanifes dalam bentuk gerakan. Bahaya laten ideologi komunis inilah yang harus diwaspadai.

PKI sebagai manifestasi ideologi komunis memang telah berhasil dibubarkan, tetapi ideologi komunis dapat tetap hidup langgeng di masyarakat melalui proses internalisasi yang sistematis dan berkelanjutan. Apalagi jika belajar pada pengalaman sejarah kita mengamati bahwa komunisme telah mampu berkembang dengan pesat dan merambah pada semua kelompok masyarakat. Beberapa organisasi massa telah dibentuk PKI, seperti Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), dan Himpunan Sarjana Indonesia (HSI). Melalui organisasi-organisasi massa inilah ideologi komunis disebarluaskan dan disemaikan pada saat kejayan PKI di Indonesia (*Matan*, 2006).

Dengan jangkauan gerakan yang demikian luas, rasanya membutuhkan waktu yang relatif lama untuk meniadakan ideologi komunis. Maka yang dapat dilakukan adalah usaha preventif agar bahaya laten ideologi komunis tidak sampai bermanifes. Tetapi, usaha ini juga sangat berat terutama jika melihat kehidupan riil masyarakat yang masih jauh dari kata sejahtera dan berkeadilan dalam banyak hal.

Umumnya masyarakat masih mengalami kesenjangan sosial ekonomi yang luar biasa. Padahal situasi demikian sangat didambakan oleh para penganut ideologi komunis. Sebab, komunisme justru akan dapat hidup subur di tengah situasi masyarakat yang mengalami kesulitan dan ketimpangan sosial ekonomi. Dengan menjan-

jikan kehidupan yang lebih adil, sejahtera, tanpa kelas, semua aset ekonomi menjadi milik bersama, dan lain-lain, masyarakat akan sangat mudah terpengaruh.

Para ideolog komunis tentu tidak akan menunjukkan jati diri gerakannya yang tidak ber-Tuhan (ateisme). Mereka menyadari bahwa jika ateisme yang menyertai ideologi komunis diketahui maka masyarakat dapat mengambil sikap kontra produktif. Apalagi beberapa daerah di Indonesia menunjukkan keadaan masyarakat yang sangat religius.

Era reformasi juga menjadi angin surga bagi penganut ideologi komunis. Kebebasan berserikat dan berpendapat yang dijamin undang-undang dan dibuka lebar pasca era Orde Baru telah memberikan semangat tersendiri bagi mereka. Beberapa tuntutan pun mulai disuarakan, misalnya pencabutan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dan UU Nomor 27/1999 tentang KUHP, yang salah satu poinnya adalah melarang kegiatan komunis. Para eks tahanan politik juga telah berani menggugat presiden melalui Pengadilan Negeri Jakarta (Agustus, 2005). Mereka mengklaim 20 juta anggota PKI telah menjadi korban tragedi G 30 S PKI dan karena itu mereka menuntut ganti rugi.

Kisah pemberontakan PKI pada 1948 dan 1965 juga sempat terhapus dari salah satu materi dalam mata pelajaran sejarah. Buku sejarah ini bahkan sudah dicetak dan beredar luas. Karena diprotes masyarakat, buku tersebut akhirnya ditarik dari peredaran. Yang lebih heboh lagi dikatakan bahwa tidak kurang dari 86 orang anggota DPR periode 2004-2009 adalah keturunan PKI. Bahkan Dr. Ribka Tjiptaning Proletariati (salah satu Ketua Komisi DPR dari FPD) dengan bangga menulis buku; *Aku Bangga Jadi Anak PKI (Matan, 2006)*. Yang paling aktual adalah keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai diperbolehkannya eks tahanan politik menjadi presiden dan pejabat publik lainnya (*Jawa Pos*, 12 Desember 2007).

Menurut Arukat Djaswadi, seorang penggiat yang sangat gigih dalam menentang komunisme, bahwa beberapa organisasi massa juga menunjukkan aliansi dan kedekatan ideologi dengan komunisme. Di antara organisasi yang dimaksud adalah LPKP '65, Pakorba, LPR-KROB, YLBHI, PBHI, LNMD, PRD, Forum Kota, Jaringan Miskin Kota, Walhi, GRI, dan Partai Buruh pimpi-

nan Mochtar Pakpahan. Arukat juga mensinyalir beberapa nama di LIPI dan BUMN sebagai keturunan PKI. Data-data tersebut, meski secara akademik dapat diperdebatkan, telah menunjukkan betapa komunisme dapat terus hidup dan perlu diwaspadai.

Dengan meminjam istilah almarhum KH Yusuf Hasyim (Pak Ud), kita harus mewaspadai segala bentuk Komunisme Gaya Baru (KGB). Barangkali patut juga dipertanyakan, apakah kemunculan aliran sesat (*splinter group*) dalam agama Islam juga menjadi bagian dari strategi perjuangan para ideologi komunis? Pertanyaan ini memang tidak mudah dijawab. Tetapi, beberapa sumber di Majelis Ulama Indonesia (MUI) mensinyalir keterkaitan aliran-aliran sesat dengan ideologi komunis. Bahkan MUI telah mengambil langkah preventif dengan memberikan fatwa sesat terhadap 10 aliran yang berkembang sejak pertengahan 1980-an (*Matan, 2007*).

Sebagai akhir dari tulisan ini penulis ingin menyatakan bahwa sesungguhnya ideologi komunis pasti tidak akan laku di masyarakat jika seluruh elemen bangsa menunjukkan kesungguhan untuk mewujudkan kehidupan sosial ekonomi yang lebih berkeadaban dan berkeadilan. Maka di sini fungsi ideologi Pancasila sebagai pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diwujudkan dengan benar. Memang, harus disadari bahwa selama era Orde Baru nilai-nilai ideologi Pancasila telah banyak diselewengkan. Hal ini tentu akan menjadi beban tersendiri. Tetapi dengan semangat reformasi, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus direalisasikan.

Paham ateisme yang menjadi bagian dari ajaran komunisme dalam perspektif agama (Islam) juga dipandang tidak relevan. Karena tidak mungkin orang dapat hidup tanpa ada sesuatu yang dipandang agung, sehingga layak dituhankan. Jadi, dalam ajaran agama dan nilai-nilai yang ada di Pancasila jelas menunjukkan sikap yang sama; menentang komunisme. Bahwa komunisme lengkap dengan paham ateisnya sesungguhnya tidak lagi relevan dengan kebutuhan umat manusia.

DAMPAK SISTEMIK FATWA HARAM MEROKOK

Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-27 di Universitas Muhammadiyah Malang pada 1-4 April 2010. Tentu saja, acara ini akan menarik perhatian masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah. Sebab, beberapa saat yang lalu, tepatnya pada 8 Maret 2010, MTT telah mengeluarkan fatwa hukum merokok.

Dalam pandangan MTT merokok hukumnya haram karena: (a) perbuatan *khaba'its* [buruk], (b) menyebabkan kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan, (c) membahayakan diri sendiri dan orang lain, (d) mengandung zat adiktif dan unsur racun yang berbahaya, (e) perbuatan mubazir [pemborosan], dan (f) bertentangan dengan tujuan penetapan syari'ah. Meski argumentasi tersebut terbuka untuk diperdebatkan, tetapi masyarakat sesungguhnya tidak ada yang menolak jika dikatakan bahwa merokok merupakan perbuatan yang dapat merusak kesehatan. Persoalannya, cukup bijaksanakah fatwa haram merokok tersebut dikeluarkan dalam kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kita?

Karena merokok bagi sebagian orang sudah dianggap budaya dan bahkan kebutuhan, maka keputusan tersebut dianggap terlalu keras. Hal ini karena mayoritas umat Islam memahami hukum merokok tidak lebih dari makruh. Pandangan resmi Muhammadiyah sebelumnya juga memutuskan bahwa merokok pada dasarnya termasuk perbuatan *ibahah* (mubah).

Karena itu, tidak mengherankan jika di kalangan warga Muhammadiyah fatwa ini disikapi dengan cara beragam. Sebagian memahami fatwa ini sudah tepat. Argumentasi yang diajukan pun sudah melingkupi berbagai aspek, termasuk agama, medis, sosial, dan ekonomi. Sementara yang lain menganggap fatwa haram merokok terlalu berlebihan, kurang bijaksana, dan tidak berempati pada petani dan industri tembakau. Apalagi hukum haram merokok secara *qath'iy* tidak ditemukan dalam berbagai teks keagamaan. Keberatan terhadap fatwa ini sangat beralasan karena budaya merokok berkaitan dengan banyak sektor kehidupan seperti pertanian, perindustrian, perekonomian, dan kebijakan.

Dampak Sistemik

Jika ditelisik lebih jauh, fatwa haram merokok –meminjam istilah yang marak dalam skandal Bank Century- sesungguhnya dapat berdampak sistemik. Dampak sistemik fatwa haram merokok ini dapat diamati dari mata rantai yang panjang dan melibatkan banyak sektor yang berkaitan dengan rokok. Misalnya, petani tembakau, buruh tani yang bekerja di lahan tembakau, pelaku jual beli tembakau, karyawan pabrik rokok, pemilik pabrik rokok, pelaku jual-beli rokok, dan pembuat regulasi industri rokok.

Fatwa haram rokok dikatakan berdampak sistemik karena di dalam Hadits Nabi Muhammad saw ditemukan adanya larangan orang memperjualbelikan sesuatu yang diharamkan. Meskipun konteks hadits ini berkaitan dengan minuman keras (*khamr*) dan babi, tetapi sangat mungkin terjadi analogi hukum untuk menjelaskan kedudukan orang yang memproduksi dan memperjualbelikan rokok. Dengan logika hukum ini maka siapa pun yang berkaitan dengan industri rokok patut khawatir. Sementara para petani tembakau juga khawatir karena dapat dianggap memproduksi bahan baku rokok.

Harus diakui, bahwa fatwa MTT tentang hukum merokok memang belum menjadi keputusan resmi Muhammadiyah. Karena untuk menjadi keputusan resmi organisasi fatwa ini perlu terlebih dulu diajukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) MTT. Jika disepakati dalam Munas, fatwa tersebut juga harus menunggu untuk ditanfidz (disahkan) oleh Pimpinan Pusat. Sete-

lah ditanfidz itulah fatwa tersebut baru menjadi keputusan resmi. Tegasnya, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menjadikan fatwa hukum merokok sebagai keputusan tetap organisasi. Ini berarti masih terbuka peluang munculnya revisi fatwa hukum merokok yang lebih arif, bijaksana, dan solutif.

Tetapi, masyarakat sudah terlanjur tahu fatwa haram merokok yang diputuskan MTT. Karena itu, terbayang pertanyaan dalam pikiran saya bagaimana jika keputusan resmi organisasi nanti memperkuat fatwa MTT? Jika ini yang terjadi maka patut dilihat efektivitas fatwa tersebut. Bukan saja, bagi masyarakat luas tetapi juga di kalangan warga Muhammadiyah.

Bagi masyarakat umum, fatwa haram merokok yang dikeluarkan oleh MTT ini bukan yang pertama. Sebab, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga pernah mengeluarkan fatwa serupa. Tetapi, kita dapat mengamati perbuatan merokok rasanya tetap menjadi budaya masyarakat. Ini berarti fatwa yang dikeluarkan lembaga-lembaga keagamaan seringkali kurang efektif karena tidak memiliki kekuatan hukum positif. Barangkali karena itu, beberapa pemerintah daerah telah membuat Peraturan Daerah (Perda) yang melarang perbuatan merokok di tempat umum. Sekali lagi, kita menyaksikan betapa regulasi yang dibuat pemerintah tersebut kurang bergigi.

Revitalisasi Fungsi Tembakau

Agar fatwa haram merokok tidak berdampak sistemik maka yang perlu dipikirkan adalah merevitalisasi fungsi tembakau. Cara ini menurut hemat saya lebih adil karena tidak akan mematikan rangkaian industri tembakau. Masyarakat, terutama para petani tembakau dan kalangan industri, perlu diberikan alternatif. Misalnya, dengan menyatakan bahwa tembakau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan di luar rokok. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tembakau bisa diekstrak dan direkayasa sehingga bermanfaat untuk kepentingan kesehatan. Hal ini jelas berbeda dengan pandangan umum yang senantiasa menyatakan bahwa daun tembakau tidak bermanfaat bagi kesehatan.

Penelitian Arief Budi Witarto (2003) dari Pusat Bioteknologi LIPI menunjukkan manfaat daun tembakau sebagai reaktor peng-

hasil protein *Growth Colony Stimulating Factor* (GCSF), suatu hormon yang penting untuk menstimulasi produksi darah. Dikatakan juga bahwa protein GCSF bisa digunakan sebagai vaksin untuk mencegah penyakit kanker.

Beberapa ilmuwan kini juga berhasil menggunakan tembakau yang telah dimodifikasi secara genetik untuk memproduksi obat penyakit diabetes. Daun tembakau pun dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk kekebalan tubuh. Prof. Pezzotti dari Universitas Verona juga menemukan manfaat daun tembakau sebagai penghasil protein obat *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang menyebabkan penyakit AIDS.

Beberapa temuan tersebut jelas menjadi angin segar bagi dunia keilmuan. Sebab, tanaman tembakau dapat memperbaiki citra di mata para ahli kesehatan. Tembakau yang selama ini hanya diambil manfaatnya untuk bahan baku rokok, ternyata dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan manusia. Rasanya, pengkajian yang mencoba untuk merekayasa manfaat tembakau perlu terus dilakukan. Pemerintah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian, dan kalangan industri, perlu melakukan kerjasama yang sinergis untuk mengemban tugas mulia ini.

Semakin banyak temuan yang menunjukkan manfaat tembakau selain untuk rokok, maka para petani dan industri yang memanfaatkan tembakau sebagai bahan baku tidak akan gulung tikar dengan adanya fatwa haram merokok. Bahwa merokok dapat merusak kesehatan adalah pandangan yang secara *common sense* diakui kebenarannya oleh masyarakat. Tetapi, fatwa hukum merokok haram yang tidak diikuti dengan solusi pasti akan menimbulkan persoalan lain. Maka, dalam konteks inilah fatwa yang dikeluarkan MTT perlu mempertimbangkan banyak hal sehingga lebih berempati pada petani dan dunia industri.